

LAPORAN KINERJA (LKj)

SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2017



Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Gd. Manggala Wanabakti , Blok I lantai 14
Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Website : <http://setbp2sdm.menlhk.go.id>



*Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan*

JAKARTA, 2018

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2017 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan P2SDM selama Tahun 2017 yang merupakan tahun ketiga Restra Badan P2SDM periode 2015-2019. LKj Sekretariat Badan P2SDM disusun sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat perencanaan kinerja dan analisis pencapaian kinerja kegiatan yang telah dicapai oleh Sekretariat Badan P2SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2017.

Laporan Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberi informasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Badan P2SDM dalam mendukung jalannya organisasi secara efektif dan efisien, baik di unit pusat maupun di unit daerah dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Badan P2SDM.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 diucapkan banyak terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sesuai tujuan penyusunannya.

Jakarta, Februari 2018

Sekretaris Badan,



Ir. Sudayatna, M.Sc

NIP. 19600610 198703 1 001





RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sekretariat Badan P2SDM) merupakan unit kerja/perangkat organisasi di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM) yang mengemban tugas dan fungsi dalam koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan P2SDM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Memasuki periode ketiga Renstra Badan P2SDM Tahun 2015-2019, Pada Tahun 2017 Sekretariat Badan P2SDM telah menetapkan 1 (satu) kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM yang menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00" (A) Pada Tahun 2019. Adapun target IKK pada Tahun 2017 sebesar 82 Poin. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Satker Sekretariat Badan P2SDM kepada publik, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Dari hasil penilaian SAKIP Badan P2SDM yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK diperoleh sebesar 72,09. Hasil pengukuran dari indikator kinerja kegiatan menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Badan P2SDM pada Tahun 2017 sebesar 87,91% dengan capaian pelaksanaan anggaran sebesar Rp28.362.710.923,00 atau sebesar 99,75% dari target sebesar Rp28.433.742.000,00. Adapun rasio efektivitas capaian kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 sebesar 0,97 yang berarti bahwa efektivitas capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat



Badan P2SDM menurun dibanding capaian tahun 2016. Penurunan nilai SAKIP tersebut tidak hanya terjadi di Badan P2SDM saja, akan tetapi juga terjadi di eselon I lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan sistem penilaian SAKIP pada Tahun 2017 yang yang belum disosialisasikan semua Eselon I KLHK oleh Inspektorat Jenderal.

Meskipun demikian, Sekretariat Badan P2SDM berkomitmen terus menerus menyempurnakan dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	2
B. Landasan Hukum	3
C. Tugas, Fungsi dan Organisasi	4
1. Tugas dan Fungsi	4
2. Organisasi.....	4
3. Sumber Daya Manusia	6
4. Sarana dan Prasarana	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis Sekretariat Badan P2SDM.....	10
B. Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kerja Tahunan	14
C. Rencana Kinerja TA. 2017.....	15
D. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
1. Reviu atas Dokumen Perencanaan.....	20
2. Reviu terhadap hasil audit Inspektorat pada SAKIP BP2SDM Tahun 2016.....	22
3. Metode Pengukuran	24
4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	26
5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	33
1. Pelaksanaan Capaian Anggaran Berdasarkan Dokumen Perencanaan Kinerja.....	94
2. Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut	94
BAB IV PENUTUP	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Pegawai Sekretariat Badan P2SDM berdasarkan Golongan Pada Tahun 2017.....	6
Tabel 2. Kondisi Pegawai Sekretariat Badan P2SDM berdasarkan jabatan Tahun 2017.....	6
Tabel 3. Kondisi pegawai lingkup Sekretariat Badan P2SDM berdasarkan pendidikan Tahun 2017.....	6
Tabel 4. Kenaikan Pangkat Pegawai Sekretariat BP2SDM	7
Tabel 5. Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Badan P2SDM.....	7
Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2015-2019.....	11
Tabel 7. Elemen Kegiatan IKK Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017	11
Tabel 8. Rencana Kerja Kegiatan Sekretariat Badan Tahun 2017	15
Tabel 9. Kronologis Revisi Anggaran DIPA APBN-P Sekretariat Badan P2SDM TA. 2017 (400205)	20
Tabel 10. Perincian Jenis Belanja DIPA BA. 29 Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017.....	21
Tabel 11. Perubahan Rencana Kinerja Sekretariat Badan P2SDM TA. 2017.....	21
Tabel 12. Hasil evaluasi SAKIP Badan P2SDM Tahun 2016	22
Tabel 13. Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017.....	27
Tabel 14. Capaian Indikator Elemen Kegiatan Sekretariat BP2SDM TA 2017.....	27
Tabel 15. Efektivitas Capaian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017.....	31
Tabel 16. Efisiensi Capaian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017	32
Tabel 17. Rasio Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah.....	33
Tabel 18. Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Kementerian LHK Tahun 2016-2017	34
Tabel 19. Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP Badan P2SDM Tahun 2015-2017	35
Tabel 20. Output, Outcome dan Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 Poin"	36
Tabel 21. Hasil kegiatan Penyusunan Konsep Peraturan Bidang P2SDM	91
Tabel 22. Pelaksanaan Capaian Anggaran Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Badan P2SDM	5
Gambar 2. Renja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2018	43
Gambar 3. Narasumber Kementerian PPN/Bappenas	44
Gambar 4. Penyusunan Anggaran Responsif Gender dan Penyusunan TOR Gender Budget Statement di Aula Dormitori Puslatmas & PGL.....	44
Gambar 5. Paparan dari Pusat Diklat SDM LHK	46
Gambar 6. Penyampaian materi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari Kementerian PPN/Bappenas.....	47
Gambar 7. Penelaahan revisi RKA-K/L oleh Tim Inspektorat Jenderal	49
Gambar 8. Diskusi Peserta Bimbingan Teknis dengan narasumber	50
Gambar 9. Penyusunan Draft Naskah Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri	51
Gambar 10. Dissemination & Validation Workshop dengan FAO	53
Gambar 11. Partisipasi delegasi Badan P2SDM menghadiri APEC-VC Workshop di Seoul.....	55
Gambar 12. Konsolidasi dengan Biro Keuangan dan DJPB.....	60
Gambar 13. Peserta Konsolidasi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017.....	61
Gambar 14. Pelabelan pada asset BMN	63
Gambar 15. Pengadaan mesin absensi	67
Gambar 16. Tampilan Website Badan P2SDM	69
Gambar 17. Statistik Badan P2SDM Tahun 2016	70
Gambar 18. Tiga edisi majalah elektronik	70
Gambar 19. Diskusi dengan Kepala Bagian IPE Sekretariat Badan P2SDM.....	71
Gambar 20. Kunjungan Anak Sekolah ke stand BP2SDM.....	72
Gambar 21. Cover Leaflet.....	73
Gambar 22. Pemuatan artikel di Majalah Ekonomi Hijau	76
Gambar 23. Narasumber Dr. Titik Setiawati memberikan materi IAS (Invansive Alien Species) dalam pertemuan Forum Komunikasi Penyuluh, Widyaiswara, Peneliti dan Guru SMKK Tahun 2017.....	76
Gambar 24. Laporan Capaian Renja Badan P2SDM Tahun 2016	77
Gambar 25. Rapat Pimpinan lingkup Badan P2SDM.....	78
Gambar 26. Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan P2SDM	79
Gambar 27. Penginputan data bulanan di aplikasi e-Monev Anggaran	80
Gambar 28. Cover LKj Badan P2SDM.....	81
Gambar 29. Desain SPIP Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017	81
Gambar 30. Pembinaan pegawai Sekretariat Badan P2SDM di Cikole Jayagiri....	82
Gambar 31. Tim Futsal Sekretariat BP2SDM.....	83



Gambar 32. Serah Terima Jabatan Struktural Eselon III lingkup Badan P2SDM .	86
Gambar 33. Proses Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	88
Gambar 34. Penilaian Kinerja Guru di SMKK Pekan Baru	89
Gambar 35. Pembahasan draft peraturan perundangan dengan pihak-pihak terkait.....	90



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017
- Lampiran 2 Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017
- Lampiran 3 Daftar Kerja Sama Dalam Negeri lingkup BP2SDM
- Lampiran 4 Surat Penyelarasan IKU Badan P2SDM





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor P. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Badan P2SDM menyusun Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2017 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Ruang lingkup dari bahasan laporan ini mencakup pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan P2SDM sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di 17 Satker. LKj Instansi Pemerintah Tahun 2017 Sekretariat Badan P2SDM merupakan hasil evaluasi kinerja Sekretariat Badan P2SDM selama 1 (satu) tahun yang dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan bidang penyuluhan dan pengembangan SDM baik di pusat maupun di daerah pada waktu yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban secara administratif dan fisik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan P2SDM pada Tahun 2017. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja dan umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pemantapan perencanaan pada waktu yang akan datang.



B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019;
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-II/2015 tentang Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kerja Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- 10) Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.05/SETBP2SDM/2015 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2015-2019;
- 11) Surat Menteri Keuangan tentang Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-029.08.1.400205/2017 tanggal 7 Desember 2016.

C. Tugas, Fungsi dan Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Badan P2SDM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, serta pelayanan administrasi di lingkungan Badan P2SDM.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Badan P2SDM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama;
- 2) Koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan anggaran;
- 3) Koordinasi dan pengelolaan data, informasi, dokumentasi dan publikasi hasil penyuluhan;
- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

2. Organisasi

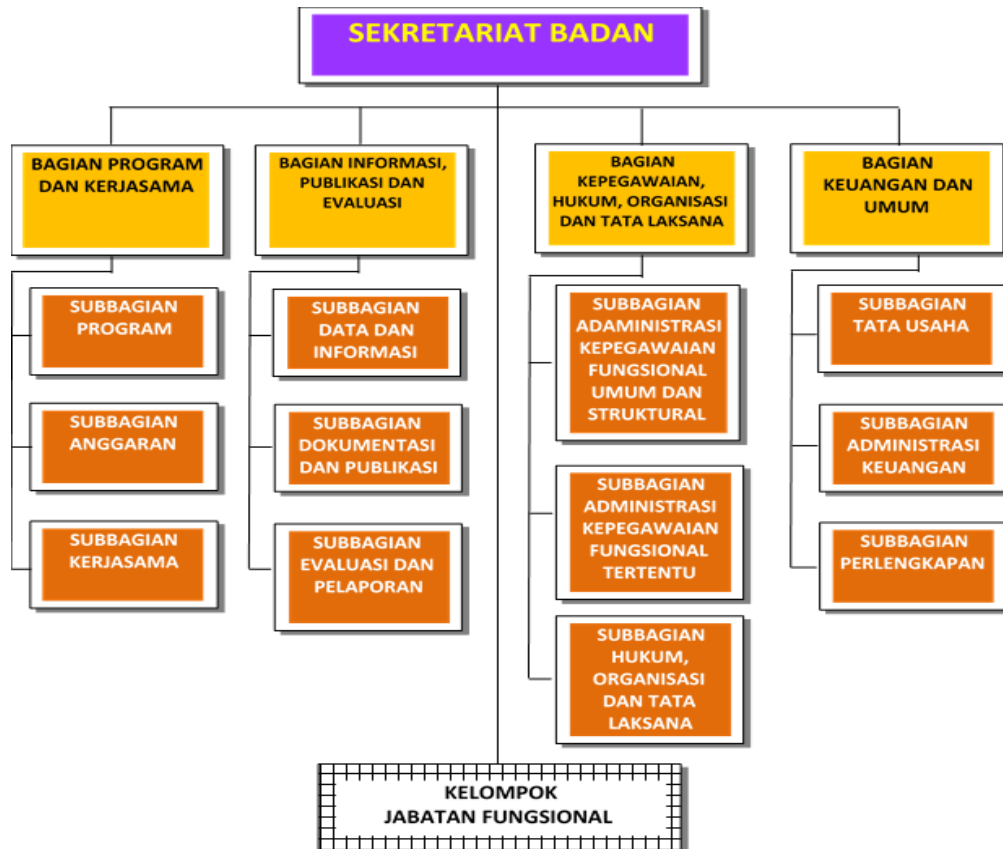
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Badan terdiri atas :

- 1) Bagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, serta administrasi kerjasama di lingkungan Badan.



- 2) Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi mempunyai tugas pengelolaan data dan informasi, dokumentasi dan publikasi serta evaluasi dan pelaporan rencana, program dan anggaran.
- 3) Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
- 4) Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, perlengkapan, administrasi keuangan, serta pengelolaan rumah tangga dan barang milik negara.

Gambar struktur organisasi Sekretariat Badan P2SDM disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Badan P2SDM

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 sebanyak 63 orang, yang terdiri dari 18 orang pejabat struktural dan 45 orang pegawai non struktural. Di samping itu terdapat 19 orang tenaga honorer yang direkrut oleh Satker Sekretariat Badan P2SDM pada Tahun 2017. Keadaan pegawai Sekretariat Badan P2SDM yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sampai dengan Desember 2017 disajikan pada Tabel 1, 2 dan 3.

Tabel 1. Kondisi Pegawai Sekretariat Badan P2SDM berdasarkan Golongan Pada Tahun 2017

Golongan	Ruang					Jumlah (orang)
	a	b	c	d	e	
I	0	0	0	0	0	0
II	0	1	7	2	0	10
III	10	17	3	9	0	39
IV	8	4	0	1	1	14
Jumlah	18	22	10	12	1	63

Tabel 2. Kondisi Pegawai Sekretariat Badan P2SDM berdasarkan jabatan Tahun 2017.

No.	Jabatan	L (Orang)	P (Orang)	Jumlah (orang)
1	Pejabat struktural	13	5	18
2	Pejabat fungsional umum	24	16	40
3	Pejabat fungsional tertentu	2	3	5
Jumlah		39	24	63

Tabel 3. Kondisi pegawai lingkup Sekretariat Badan P2SDM berdasarkan pendidikan Tahun 2017.

No.	Pendidikan	L (Orang)	P (Orang)	Jumlah (orang)
1	Doktor / Ph.D / S-3	0	0	0
2	Master / Magister / S-2	14	3	17
3	Sarjana / S-1	14	16	30
4	Diploma	5	4	9
5	SLTA	5	2	7
Jumlah		38	25	63

Pada Tahun 2017 terdapat 7 orang pegawai Satker Sekretariat Badan P2SDM yang mengalami kenaikan pangkat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Kenaikan Pangkat Pegawai Sekretariat BP2SDM

No	Semula	Menjadi	Jumlah (orang)
1	IIIc	IIIId	1
2	IIIId	IVa	3
3	Iva	IVb	1
4	IVc	IVd	1
5	IVd	IVe	1

Pada Tahun 2017 terdapat 2 orang pegawai Satker Sekretariat Badan P2SDM yang pensiun. Sekretariat Badan P2SDM secara tegas melakukan penegakan hukuman disiplin terhadap PNS yang melanggar disiplin pegawai. Pada Tahun 2017 terdapat 8 orang pegawai yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin ringan dengan rincian: 1 orang PNS mendapatkan hukuman teguran lisan, 6 orang PNS mendapatkan hukuman teguran tertulis dan 1 orang PNS mendapatkan hukuman teguran pernyataan tidak puas secara tertulis.

4. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Badan P2SDM dilengkapi dengan sarana prasarana perkantoran dan sarana transportasi, secara rinci sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Badan P2SDM

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Jeep	2	-	2
2	Sedan	1	-	1
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	14	-	14
4	Sepeda Motor	189	3	192
	a. Sekretariat Badan	8	1	9
	b. Kabupaten/Kota (Penyuluh Kehutanan)	181	2	183
5	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2	-	2

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
6	Lemari Besi/Metal	27	-	27
7	Lemari Kayu	22	-	22
8	Rak Kayu	9	-	9
9	Brandkas	5	-	5
10	Kardex Besi	12	-	12
11	Lemari Katalog	5	-	5
12	White Board	3	-	3
13	Alat Penghancur Kertas	3	-	3
14	Mesin Absensi	2	3	5
15	LCD Projector/Infokus	10	-	10
16	Meja Kerja Kayu	80	-	80
17	Kursi Besi/Metal	53	-	53
18	Kursi Kayu	30	-	30
19	Sice	8	-	8
20	Meja makan kayu	1	-	1
21	Kursi Fiber Glas/Plastik	60	-	60
22	Jam Elektronik	3	-	3
23	Lemari Es	4	-	4
24	AC Window	11	-	11
25	AC Split	6	-	6
26	Kipas Angin	4	-	4
27	Televisi	5	1	6
28	Sound System	2	-	2
29	Camera Video	2	-	2
30	Dispenser	6	1	7
31	Karpet	2	-	2
32	Gordyn/Kray	6	-	6
33	DVD Player	2	-	2
34	Voice Recorder	3	-	3
35	Lensa Kamera	1	-	1
36	Alat Pemanas Processing (Water Heater)	2	-	2
37	Layar Film Projector	3	-	3
38	Pesawat Telephone	5	-	5
39	Facsimile	2	-	2



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Sekretariat Badan P2SDM

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2015 –2019 merupakan instrumen dasar kerangka kerja penyelenggaraan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya lingkup Badan P2SDM selama jangka waktu satu periode 5 (lima) tahun secara terarah dan berkesinambungan guna mendukung penyelenggaraan program Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Sebagai salah satu unit kerja eselon II di bawah Badan P2SDM, organisasi Sekretariat Badan P2SDM dituntut mampu memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi, pembinaan, serta pelayanan administrasi utamanya di lingkup Badan P2SDM.

Rencana Strategis Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2015 – 2019 diterbitkan melalui Peraturan Sekretaris Badan P2SDM Nomor P.01/Setbadan-1/2015 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.07/SETBP2SDM/2015 tentang Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2015 – 2019. Secara umum, dokumen Renstra Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2015 – 2019 memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya.

Sasaran strategis organisasi Sekretariat Badan P2SDM merupakan hasil nyata yang akan dicapai selama periode Tahun 2015 – 2019 berdasarkan rumusan Renstra Badan P2SDM Tahun 2015-2019. Sasaran strategis organisasi Sekretariat Badan P2SDM adalah meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan P2SDM.

Indikator kinerja kegiatan (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai Sekretariat Badan P2SDM dalam pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya lingkup Badan P2SDM dan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKK Sekretariat Badan P2SDM sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2015-2019

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Badan P2SDM	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00

Indikator Kinerja Sekretariat Badan P2SDM berupa peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal "SAKIP" pada Tahun 2017 dengan nilai minimal 82.00, dirinci dalam elemen kegiatan sebagai berikut:

Tabel 7. Elemen Kegiatan IKK Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2017
Unit Kegiatan Koordinasi Tata Kelola Rencana Program, Anggaran Dan Kerjasama (UK1)			
Koordinasi Penyusunan Rencana Program (EK1)			
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensiadministrasi Dan Teknis Perencanaan/Program	1. Tersusunnya Renja Lingkup Badan P2SDM	Dok	2
	2. Tersusunnya Dokumen Perencanaan P2SDM	Lap	1
	3. Terlaksananya Workshop Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Lingkup Badan P2SDM	Dok	1
	4. Terlaksananya Dokumen Perjanjian Kinerja Lingkup Badan P2SDM	Dok	1
	5. Tersusunnya Bimtek Dalam Pelaksanaan Program P2SDM	Lap	1
Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran (EK2)			
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Administrasi Anggaran Dan Teknis Revisi Anggaran	1. Tersusunnya Petunjuk POL	Dok	1
	2. Tersusunnya Dokumen RKA-K/L Pagu Definitive	Dok	2
	3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi Kemenkeu Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran	Lap	1
	4. Terlaksananya Rapat Pencermatan Dan Penelaahan Proses Revisi RKA-K/L DIPA Badan P2SDM	Lap	1
	5. Terlaksananya Bimbingan Teknis Dan Penyegaran Operator RKA-K/L	Lap	1
Koordinasi Pengembangan Kerjasama Teknis P2SDM (EK3)			
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi	1. Terlaksananya Kerjasama Dengan Stakeholder	Dok	1

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2017
Pengembangan Kerjasama Teknis Penyuluhan Dan Pengembangan Sdm	2. Terlaksananya Kerjasama Internasional	Dok	1
	3. Terlaksananya Pembinaan Bidang Kerjasama (Pengelolaan Hibah, Dokumen Perijinan, Mou)	Lap	1
	4. Terlaksananya Monev Kerjasama Lingkup Badan P2SDM	Lap	1
Unit Kegiatan Koordinasi Tata Kelola Keuangan Dan Umum (UK2)			
Koordinasi Pembinaan Administrasi Umum (EK1)			
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Pembinaan Administrasi Umum	1. Terlaksananya Penataan Administrasi Umum	Lap	1
	2. Terlaksananya Penatausahaan Persuratan	Lap	1
	3. Terlaksananya Operasional Pimpinan	Lap	1
Koordinasi Pembinaan Administrasi Keuangan (EK2)			
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Pembinaan Administrasi Keuangan	1. Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan Tahun 2016 Lingkup Badan P2SDM	Lap	1
	2. Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I Lingkup Badan P2SDM Tahun 2017	Lap	1
	3. Tersusunnya Laporan Keuangan Lingkup Badan P2SDM	Lap	1
	4. Terlaksananya Monev Tindak Lanjut Temuan BPK-RI/Itjen/Administrasi Keuangan Hibah/ Tindak Lanjut TP/TGR Lingkup Badan P2SDM	Lap	1
Koordinasi Pembinaan Administrasi Perlengkapan (EK3)			
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Pembinaan Administrasi Perlengkapan	1. Tersusunnya Laporan Akuntansi Bmn (SIMAK-BMN) Lingkup Badan P2SDM	Lap	4
	2. Terselenggaranya Bimbingan Teknis Bagi Tim Sekretariat ULP Dan Pokja ULP	Lap	1
	3. Tersedianya Perlengkapan Ruang Rapat	Unit	36
	4. Tersedianya Peralatan Elektronik	Buah	17
	5. Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	Paket	1
	6. Terselenggaranya Rencana Kegiatan BMN Tahun 2019 Lingkup Badan P2SDM	Lap	1
Layanan Internal		Layanan	1
Layanan Perkantoran		Bulan	12
Unit Kegiatan Koordinasi Tata Kelola Informasi, Publikasi Dan Evaluasi (UK3)			
Koordinasi Pengelolaan Data Dan Informasi (EK1)			
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Pengembangan Data Dan Informasi	1. Terlaksananya Pengelolaan Website Badan P2SDM	Lap	1
	2. Tersusunnya Statistik Badan P2SDM	Dok	1
	3. Terlaksananya Pengelolaan Majalah Elektronik P2SDM	Lap	1
	4. Terselenggaranya Rakor Bidang IPE	Lap	1

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2017
Koordinasi Penyiapan Dokumentasi Dan Publikasi (EK2)			
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Dokumntasi Dan Publikasi	1. Terselenggaranya Pameran	Lap	1
	2. Tersusunnya Diseminasi Keberhasilan P2SDM	Lap	1
	3. Terlaksananya Publikasi Di Media Cetak/Majalah	Lap	1
	4. Terselenggaranya Forum Komunikasi Penyuluh, Widyaiswara, Peneliti dan Guru SMK Kehutanan	Lap	1
Koordinasi Evaluasi Dan Pelaporan (EK3)			
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Evaluasi Dan Pelaporan	1. Tersusunnya Laporan Capaian Renja Dan Laporan Tahunan	Lap	4
	2. Terlaksananya Monev Penyelenggaraan P2SDM	Lap	1
	3. Tersusunnya Pedoman Penilaian Kriteria Dan Indikator Badan P2SDM	Pedoman	1
	4. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Kegiatan	Lap	32
	5. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Lap	2
	6. Tersusunnya Laporan SPIP Satker Sekretariat Badan P2SDM	Lap	1
Unit Kegiatan Koordinasi Tata Kelola Kepegawaian, Hukum, Organisasi Dan Tata Laksana (UK4)			
Koordinasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Fungsional Umum Dan Struktural (EK1)			
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Administrasi Kepegawaian Fungsional Umum Dan Structural	1. Terlaksananya Pembinaan Pegawai	Lap	1
	2. Terlaksananya Pembinaan Kesegaran Jasmani	Lap	1
	3. Terlaksananya Pemutahiran Data Pegawai Dan Penyusunan Laporan Lingkup Badan P2SDM	Lap	1
	4. Tersusunnya Laporan Pengambilan Sumpah Pns, Serah Terima Jabatan, Pelantikan Dan Pisah Sambut Lingkup Badan P2SDM	Lap	1
Koordinasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Fungsional Tertentu (EK2)			
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Administrasi Kepegawaian Fungsional Tertentu	1. Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Lingkup Badan P2SDM	Lap	1
	2. Terlaksananya Koordinasi Pengelola Administrasi Jabatan Fungsional	Lap	1
	3. Terlaksananya Penilaian Kinerja Guru	Lap	1
	4. Terlaksananya Pembinaan Pejabat Fungsional	Lap	1
	5. Terlaksananya Pengembangan Pegawai	Lap	1

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2017
Koordinasi Pembinaan Hukum, Organisasi Dan Tata Laksana (EK3)			
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Pembinaan Hukum, Organisasi Dan Tata Laksana	1. Tersusunnya Draft Peraturan Perundangan Bidang P2SDM	Draft Peraturan	10
	2. Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) Lingkup Badan P2SDM	Lap	1

A. Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 merupakan instrumen dasar untuk kerangka kerja, perkiraan pembiayaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya dalam mendukung penyelenggaraan Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2017. Substansi Renja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 merupakan jabaran lebih lanjut dari Renja Badan P2SDM Tahun 2017 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.16/P2SDM/SET/REN.0/10/2016 yang mengacu pada Rencana Strategis Badan P2SDM 2015-2019.

Dokumen Renja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan/usulan rencana kerja dan anggaran masing – masing bagian di lingkup satuan kerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017. Pagu anggaran Renja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 merupakan pagu indikatif sebagai batas atas belanja dalam penyusunan rancangan/usulan kegiatan sesuai hasil *Trilateral Meeting* antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan P2SDM. Pagu indikatif untuk penyelenggaraan program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2017 adalah sebesar 307,83 Milyar. Dari pagu tersebut, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya adalah sebesar 29,76 Milyar atau 9,67%. Renja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 sebagaimana disajikan pada Tabel 8 berikut.

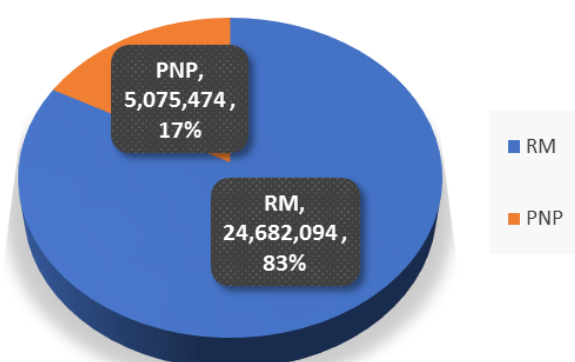
Tabel 8. Rencana Kerja Kegiatan Sekretariat Badan Tahun 2017

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2015-2019	Target Tahun 2017	Pagu (x Rp1000)
<p>Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</p> <p>Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yg baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</p>	<p>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A) di Tahun 2019.</p>	82 Poin	29.757,6

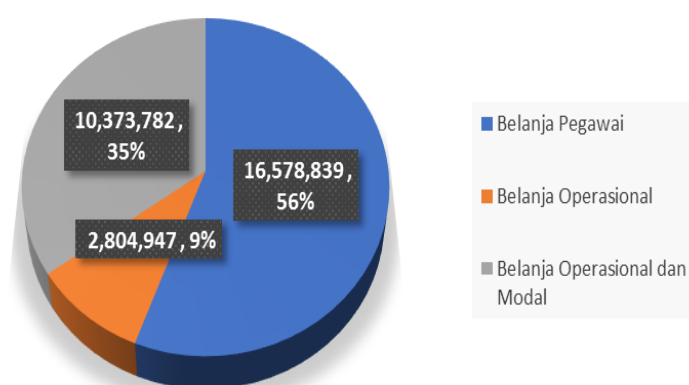
B. Rencana Kinerja TA. 2017

Rencana Kinerja merupakan rencana kegiatan anggaran dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Badan P2SDM. Alokasi pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Badan P2SDM adalah sebesar Rp29.757.568.000,00. Alokasi anggaran tersebut tertampung dalam DIPA 29 Sekretariat Badan P2SDM TA. 2017 dengan perincian alokasi per sumber dana dan alokasi per belanja sebagaimana diagram di bawah.

Pagu Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017
Per Sumber Dana



Alokasi Pagu Sekretariat BP2SDM
Per Belanja



C. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017

Perjanjian Kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi/lembaga. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Penetapan Kinerja, istilah penetapan kinerja telah diubah menjadi perjanjian kinerja. Tujuan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai (SKP).

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya DIPA BA. 29 Sekretariat Badan P2SDM TA. 2017, telah dilaksanakan Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 antara Sekretaris Badan P2SDM dengan Kepala Badan P2SDM pada bulan Desember 2016. Perjanjian kinerja ini berisi mengenai komitmen Sekretaris Badan P2SDM untuk memenuhi target kinerja pada Tahun 2017, yaitu nilai SAKIP Badan P2SDM minimal 82,00 poin.

Dengan adanya pergeseran anggaran dan perubahan target capaian pada masing-masing unit kerja Eselon II, maka dilakukan revisi Perjanjian Kinerja antara pejabat Eselon II dan Kepala UPT dengan Kepala Badan P2SDM pada Bulan Agustus 2017. Meskipun anggaran Sekretariat Badan P2SDM mengalami penurunan menjadi Rp28.433.742.000,00, namun target kinerja Sekretariat Badan P2SDM tidak mengalami perubahan (tetap 82,00 poin).

Secara umum, muatan penetapan kinerja berisi sasaran, indikator kinerja kegiatan, serta alokasi anggaran sesuai Dokumen Rencana Kerja Tahun 2017 dan DIPA BA. 29 Sekretariat Badan P2SDM Tahun Anggaran 2017 Nomor DIPA 029081.1.400205/2016 tertanggal 7 Desember 2016. Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Badan P2SDM dengan Kepala Badan P2SDM Tahun 2017 disajikan pada Lampiran 1 dan 2.





BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Reviu atas Dokumen Perencanaan

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang efisiensi belanja barang K/L dalam pelaksanaan APBN TA 2017 diterbitkan Surat Menteri Keuangan nomor S.584/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017 perihal APBN-P K/L. Menindaklanjuti Inpres dan Surat Menteri Keuangan tersebut, Menteri LHK mengeluarkan Surat Nomor S.263/MENLHK/SETJEN/SET.1/7/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Usulan Revisi APBN-P Kementerian LHK TA 2017. Dalam rangka penghematan tersebut, Kementerian LHK mengalami perubahan anggaran dari Rp6.772.367.622.000,00 menjadi Rp6.463.271.982.000,00 atau mengalami penghematan sebesar Rp309.095.640.000,00.

Sesuai DIPA APBN-P unit kerja Badan P2SDM TA 2017 yang diterbitkan pada Bulan Agustus 2017, pagu anggaran Badan P2SDM menjadi Rp303.052.193.000,00 dan pagu anggaran Sekretariat Badan P2SDM menjadi Rp28.433.742.000,00. Kronologis revisi anggaran DIPA APBN menjadi APBN-P, Perincian Jenis Belanja dan perubahan Rencana Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 9. Kronologis Revisi Anggaran DIPA APBN-P Sekretariat Badan P2SDM TA. 2017 (400205)

No	Uraian	Pagu (Rp)	Nomor Pengesahan
1.	DIPA APBN	29.757.568.000	SP DIPA.029.08-1.400205/2017 Tanggal 07 Desember 2017
2.	DIPA APBN Revisi ke 01 - Kanwil DJPb	29.757.568.000	SP DIPA.029.08-1.400205/2017 Tanggal 08 Februari 2017
3.	DIPA APBN Revisi ke 02 - Kanwil DJPb	29.757.568.000	SP DIPA.029.08-1.400205/2017 Tanggal 16 Februari 2017
4.	DIPA APBN Revisi ke 03 - Kanwil DJPb	29.757.568.000	SP DIPA.029.08-1.400205/2017 Tanggal 14 Juli 2017
5.	DIPA APBN Revisi ke 04 – DJA	29.757.568.000 (<i>self blocking</i> sebesar Rp1.323.826.000)	SP DIPA.029.08-1.400205/2017 Tanggal 28 Juli 2017
6.	DIPA APBN-P Revisi ke 05 - DJA	28.433.742.000	SP DIPA.029.08-1.400205/2017 Tanggal 09 Agustus 2017
7.	DIPA APBN-P Revisi ke 06 - Kanwil DJPb	28.433.742.000	SP DIPA.029.08-1.400205/2017 Tanggal 23 Agustus 2017
8.	DIPA APBN-P Revisi ke 07 - Kanwil DJPb	28.433.742.000	SP DIPA.029.08-1.400205/2017 Tanggal 23 Oktober 2017

No	Uraian	Pagu (Rp)	Nomor Pengesahan
9.	DIPA APBN-P Revisi ke 08 - Kanwil DJPb	28.433.742.000	SP DIPA.029.08-1.400205/2017 Tanggal 20 November 2017
10.	DIPA APBN-P Revisi ke 09 - Kanwil DJPb	28.433.742.000	SP DIPA.029.08-1.400205/2017 Tanggal 30 November 2017
11.	DIPA APBN-P Revisi ke 10 - Kanwil DJPb	28.433.742.000	SP DIPA.029.08-1.400205/2017 Tanggal 20 Desember 2017
12.	DIPA APBN-P Revisi ke 11 - Kanwil DJPb	28.433.742.000	SP DIPA.029.08-1.400205/2017 Tanggal 29 Desember 2017

Tabel 10. Perincian Jenis Belanja DIPA BA. 29 Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017

(x 1.000)

Revisi ke-	Tanggal Pengesahan	Pagu semula (Rp)			Pagu menjadi (Rp)		
		RM	PNP	Jumlah	RM	PNP	Jumlah
1.	8 Februari	24.682.094	5.075.474	29.757.568	24.682.094	5.075.474	29.757.568
2.	16 Februari	24.682.094	5.075.474	29.757.568	24.682.094	5.075.474	29.757.568
3.	14 Juli	24.682.094	5.075.474	29.757.568	24.682.094	5.075.474	29.757.568
4.	28 Juli	24.682.094	5.075.474	29.757.568	24.682.094	5.075.474	29.757.568
5.	9 Agustus	24.682.094	5.075.474	29.757.568	23.358.268	5.075.474	28.433.742
6.	23 Agustus	23.358.268	5.075.474	28.433.742	23.358.268	5.075.474	28.433.742
7.	23 Oktober	23.358.268	5.075.474	28.433.742	23.358.268	5.075.474	28.433.742
8.	20 November	23.358.268	5.075.474	28.433.742	23.358.268	5.075.474	28.433.742
9.	30 November	23.358.268	5.075.474	28.433.742	23.358.268	5.075.474	28.433.742
10.	20 Desember	23.358.268	5.075.474	28.433.742	23.358.268	5.075.474	28.433.742
11.	29 Desember	23.358.268	5.075.474	28.433.742	23.358.268	5.075.474	28.433.742

Tabel 11. Perubahan Rencana Kinerja Sekretariat Badan P2SDM TA. 2017

Kode	Kegiatan/Output	Volume/ Satuan	Anggaran (Rp)
5439	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM Kehutanan	82 poin	29.757.568.000
Menjadi			
5439	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM		28.433.742.000
5439.001	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 84,00 (A) di Tahun 2019	82 poin	9.761.956.000
5439.994	Layanan Perkantoran	12 Bulan	18.623.786.000
5439.951	Layanan Internal (<i>Overhead</i>)	1 Layanan	48.000.000

2. Reviu Terhadap Hasil Audit Inspektorat pada SAKIP BP2SDM Tahun 2016

Hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan P2SDM Tahun 2016 mencakup 5 komponen manajemen kinerja yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Hasil penilaian dari Inspektorat Jenderal terhadap SAKIP Badan P2SDM Tahun 2016 adalah sebesar 72,09 atau **BB (sangat baik)**. Hasil evaluasi SAKIP Badan P2SDM Tahun 2016 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil evaluasi SAKIP Badan P2SDM Tahun 2016

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,22
2.	Pengukuran Kinerja	25	13,95
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,17
4.	Evaluasi Kinerja	10	10,00
5.	Capaian Kinerja	20	14,75
TOTAL		100	72,09
KATEGORI SAKIP		BB	Sangat Baik

Meskipun hasil evaluasi SAKIP Badan P2SDM Tahun 2016 dikategorikan sangat baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan pada beberapa komponen kinerja yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan capaian kinerja. Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian LHK terhadap kelemahan tersebut antara lain :

- a. Koordinasi dengan Sekretaris Jenderal c.q Biro Perencanaan dalam rangka penyelarasan antara Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).
- b. Mempublikasikan melalui website BPPSDM (<http://bp2sdmk.dephut.go.id/>) terhadap revisi Perjanjian Kinerja (PK) Eselon I BPPSDM Tahun 2016.
- c. Evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang realisasi anggarannya melebihi realisasi fisik/capaian kinerjanya yaitu jumlah generasi

lingkungan meningkat kapasitasnya serta sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan.

- d. Menyelesaikan revisi Peraturan Kepala BPPSDM Nomor P.1/IX/SET/2013 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.
- e. Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
- f. Memerintahkan Kepala Pusat Diklat SDM LHK untuk :
 - Melakukan perbaikan terhadap perbedaan target pencapaian indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan diklat antara dokumen Renstra Pusdiklat SDM LHK Tahun 2015-2019 dengan Renja Pusdiklat SDM LHK.
 - Mempublikasikan Renstra Pusdiklat SDM LHK Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 dalam website Pusdiklat SDM LHK (<http://bp2sdmk.dephut.go.id/pusdiklat/>)

Semua hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian LHK terhadap kelemahan SAKIP Badan P2SDM Tahun 2016 **sudah ditindaklanjuti**. Tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal KLHK antara lain:

- a. Badan P2SDM telah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dalam rangka penyelarasan IKU melalui surat Sekretaris Badan P2SDM Nomor S.1734/SET/IPE/REN.2/11/2017 (terlampir pada lampiran 4).
- b. Badan P2SDM telah melakukan revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 melalui nota dinas Kepala Badan P2SDM pada Menteri LHK dengan nomor ND. 167/P2SDM/SET/REN.3/12/2016. Revisi tersebut telah dipublikasikan melalui website Badan P2SDM dengan alamat url <http://bp2sdm.menlhk.go.id/web/index.php/2018/01/31/revisi-perjanjian-kinerja-bp2sdm-tahun-2016/>.
- c. Kepala Badan P2SDM sudah memerintahkan Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan PGL melalui memo Nomor M.6/P2SDM/SET/WAS.8/11/2017 tentang Tindak Lanjut Temuan Itjen pada Penilaian SAKIP 2016 untuk memberikan penjelasan dan mengevaluasi terdapatnya capaian kinerja/fisik yang lebih besar dari capaian anggaran.



- d. Badan P2SDM telah selesai merevisi Peraturan Kepala Badan P2SDM nomor P.1/IX/SET/2013 tentang pedoman penilaian kinerja Program penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.6/P2SDM/SET/REN.2/5/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan P2SDM pada tanggal 29 Mei 2017.
- e. Badan P2SDM setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada Satker lingkup Badan P2SDM yang capaian penyerapan anggarannya tertinggi.
- f. Kepala Badan P2SDM telah memerintahkan Kepala Pusat Diklat SDM LHK melalui memo Nomor M.5/P2SDM/SET/WAS.8/11/2017 tentang Tindak Lanjut Temuan Itjen pada Penilaian SAKIP 2016 untuk melakukan penyelarasan antara target diklat pada Renstra dan Renja Badan P2SDM serta mempublikasikan dokumen Renstra, Renja dan PK Pusat Diklat SDM LHK melalui website.

3. Metode Pengukuran

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang penilaian capaian visi dan misi sebuah instansi dilakukan dengan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase capaian kinerja yang meliputi kinerja fisik, kinerja keuangan, serta tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan capaian kinerja.

a. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan capaian rencana dan/atau keberhasilan capaian kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi pengukuran Capaian Kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Pengukuran Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



b. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan perhitungan pengukuran capaian kinerja, dilakukan evaluasi terhadap capaian pada setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di waktu yang akan datang.

Untuk meminimalisir bias dalam penghitungan capaian kinerja sasaran, Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi arahan bahwa khusus untuk sasaran yang memiliki tingkat capaian kinerja yang melebihi 150%, diasumsikan capaiannya maksimal sebesar 150%.

Evaluasi dilakukan dengan melakukan pengukuran tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Selain itu juga, evaluasi dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.

c. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini dijelaskan perkembangan kondisi capaian dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan apabila memungkinkan dilakukan evaluasi kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Implementasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan P2SDM sesuai nomenklatur dokumen perencanaan terakomodir dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan P2SDM. Tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Badan P2SDM dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Dalam hal pengukuran capaian kinerja, maka sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kriteria capaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika capaiannya melebihi 80%. Berdasarkan kriteria tersebut, maka capaian indikator kinerja Sekretariat Badan P2SDM sebesar 87,91% masuk dalam penilaian kinerja dengan predikat sangat baik.

Pada Tahun anggaran 2017, Sekretariat Badan P2SDM menetapkan 1 (satu) sasaran yang akan dicapai pada 4 (empat) bagian yang ada pada Sekretariat Badan P2SDM. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 1(satu) indikator kinerja yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A) di Tahun 2019." Pada Tahun anggaran 2017 target indikator kinerja Sekretariat Badan P2SDM adalah SAKIP dengan nilai 82 Poin. Pengukuran kinerja atas indikator ini didasarkan pada hasil penilaian Itjen atas SAKIP Badan P2SDM Tahun 2016.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Badan P2SDM dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 disajikan sebagaimana Tabel 13.

Tabel 13. Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan P2SDM	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A) di Tahun 2019	82 Poin	72,09 Poin	87,91

Tabel 14. Capaian Indikator Elemen Kegiatan Sekretariat BP2SDM TA 2017

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
Unit Kegiatan Koordinasi Tata Kelola Rencana Program, Anggaran dan Kerjasama (UK1)					
Koordinasi Penyusunan Rencana Program (EK1)					
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Administrasi Dan Teknis Perencanaan /Program	1. Tersusunnya Renja Lingkup Badan P2SDM	Dok	2	2	100
	2. Tersusunnya Dokumen Perencanaan P2SDM	Lap	1	1	100
	3. Terlaksananya Workshop Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Lingkup Badan P2SDM	Dok	1	1	100
	4. Terlaksananya Dokumen Perjanjian Kinerja Lingkup Badan P2SDM	Dok	1	1	100
	5. Tersusunnya Bimtek Dalam Pelaksanaan Program P2SDM	Lap	1	1	100
Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran (EK2)					
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Administrasi Anggaran Dan Teknis Revisi Anggaran	1. Tersusunnya Petunjuk POK	Dok	1	1	100
	2. Tersusunnya Dokumen RKAKL Pagu Definitif	Dok	2	2	100
	3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi Kemenkeu dalam Rangka Penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran	Lap	1	1	100

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
	4. Terlaksananya Rapat Pencermatan dan Penelaahan Proses Revisi RKAKL DIPA BP2SDM	Lap	1	1	100
	5. Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Penyegaran Operator RKA-K/L	Lap	1	1	100
Koordinasi Pengembangan Kerjasama Teknis P2SDM (EK3)					
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Pengembangan Kerjasama Teknis Penyuluhan Dan Pengembangan SDM	1. Terlaksananya Kerjasama dengan Stakeholder	Dok	1	1	100
	2. Terlaksananya Kerjasama Internasional	Dok	1	1	100
	3. Terlaksananya Pembinaan Bidang Kerjasama (Pengelolaan Hibah, Dokumen Perijinan, MoU)	Lap	1	1	100
	4. Terlaksananya Monev Kerjasama Lingkup Badan P2SDM	Lap	1	1	100
Unit Kegiatan Koordinasi Tata Kelola Keuangan dan Umum (UK2)					
Koordinasi Pembinaan Administrasi Umum (EK1)					
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Pembinaan Administrasi Umum	1. Terlaksananya Penataan Administrasi Umum	Lap	1	1	100
	2. Terlaksananya Penatausahaan Persuratan	Lap	1	1	100
	3. Terlaksananya Operasional Pimpinan	Lap	1	1	100
Koordinasi Pembinaan Administrasi Keuangan (Ek2)					
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Pembinaan Administrasi Keuangan	1. Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan Tahun 2016 Lingkup BP2SDM	Lap	1	1	100
	2. Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I Lingkup BP2SDM Tahun 2017	Lap	1	1	100
	3. Tersusunnya Laporan Keuangan Lingkup BP2SDM	Lap	1	1	100
	4. Terlaksananya Monev Tindak Lanjut Temuan BPK-RI/Itjen/Administrasi Keuangan Hibah/Tindak Lanjut TP/TGR Lingkup BP2SDM	Lap	1	1	100
Koordinasi Pembinaan Administrasi Perlengkapan (EK3)					
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi	1. Tersusunnya Laporan Akuntansi BMN (SIMAK-BMN) Lingkup BP2SDM	Lap	4	4	100

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
Pembinaan Administrasi Perlengkapan	2. Terselenggaranya Bimbingan Teknis Bagi Tim Sekretariat ULP Dan Pokja ULP	Lap	1	1	100
	3. Tersedianya Perlengkapan Ruang Rapat	Unit	36	36	100
	4. Tersedianya Peralatan Elektronik	Buah	17	17	100
	5. Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	paket	1	1	100
	6. Terselenggaranya Rencana Kegiatan BMN Tahun 2019 Lingkup Badan P2SDM	Lap	1	1	100
Layanan Internal		Layanan	1	1	100
Layanan Perkantoran		Bulan	12	12	100
Unit Kegiatan Koordinasi Tata kelola Informasi, Publikasi dan Evaluasi (UK3)					
Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi (EK1)					
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengembangan data dan informasi	1. Terlaksananya Pengelolaan Website Badan P2SDM	Lap	1	1	100
	2. Tersusunnya Statistik Badan P2SDM	Dok	1	1	100
	3. Terlaksananya Pengelolaan Majalah Elektronik P2SDM	Lap	1	1	100
	4. Terselenggaranya Rakor Bidang IPE	Lap	1	1	100
Koordinasi Penyiapan Dokumentasi dan Publikasi (EK2)					
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dokumentasi dan publikasi	1. Terselenggaranya Pameran	Lap	1	1	100
	2. Tersusunnya Diseminasi Keberhasilan P2SDM	Lap	1	1	100
	3. Terlaksananya Publikasi di Media Cetak/majalah	Lap	1	1	100
	4. Terselenggaranya forum komunikasi Penyuluh, Widyaiswara, Peneliti dan Guru SMK Kehutanan	Lap	1	1	100
Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan (EK3)					
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi evaluasi dan pelaporan	1. Tersusunnya Laporan Capaian Renja Dan Laporan Tahunan	Lap	4	4	100
	2. Terlaksananya Monev Penyelenggaraan P2SDM	Lap	1	1	100
	3. Tersusunnya Pedoman Penilaian Kriteria Dan Indikator BP2SDM	Pedoman	1	1	100
	4. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan kegiatan	Lap	32	32	100

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
	5. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Lap	2	2	100
	6. Tersusunnya laporan SPIP Satker Sekretariat BP2SDM	Lap	1	1	100
Unit Kegiatan Koordinasi Tata Kelola Kepegawaian, Hukum, Organisasi Dan Tata Laksana (UK4)					
Koordinasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Fungsional Umum Dan Struktural (EK1)					
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Administrasi Kepegawaian Fungsional Umum Dan Struktural	1. Terlaksananya Pembinaan Pegawai	Lap	1	1	100
	2. Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Jasmani	Lap	1	1	100
	3. Terlaksananya Pemutahiran Data Pegawai Dan Penyusunan Laporan Lingkup Badan P2SDM	Lap	1	1	100
	4. Tersusunnya Laporan Pengambilan Sumpah PNS, Serah Terima Jabatan, Pelantikan Dan Pisah Sambut Lingkup BP2SDM	Lap	1	1	100
Koordinasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Fungsional Tertentu (EK2)					
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Administrasi Kepegawaian Fungsional Tertentu	1. Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Lingkup Badan P2SDM	Lap	1	1	100
	2. Terlaksananya Koordinasi Pengelola Administrasi Jabatan Fungsional	Lap	1	1	100
	3. Terlaksananya Penilaian Kinerja Guru	Lap	1	1	100
	4. Terlaksananya Pembinaan Pejabat Fungsional	Lap	1	1	100
	5. Terlaksananya Pengembangan Pegawai	Lap	1	1	100
Koordinasi Pembinaan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana (EK3)					
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pembinaan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	1. Tersusunnya Draft Peraturan Perundangan Bidang P2SDM	Draft Peraturan	10	13	130
	2. Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) Lingkup BP2SDM	Lap	1	1	100

b. Efektivitas Kinerja

Pengukuran efektivitas capaian kinerja sasaran Tahun 2017 dilakukan melalui perbandingan dengan capaian kinerja Tahun 2016. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui kemajuan efektivitas pelaksanaan kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2017.

$$\text{Efektivitas Capaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian kinerja fisik tahun berjalan}}{\text{Capaian kinerja fisik tahun sebelumnya}}$$

Rasio yang dihasilkan > 1 terjadi peningkatan. Apabila rasio yang dihasilkan = 1 maka efektivitas capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya adalah tetap atau sama dengan tahun sebelumnya. Rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan efektivitas capaian kinerja sasaran yang menurun, sehingga perlu adanya percepatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang yang dirumuskan dalam Renja/RKT, guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun periode Renstra. Efektivitas Capaian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 disajikan sebagaimana Tabel 15.

Tabel 15. Efektivitas Capaian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017

No	Indikator	Output Kegiatan	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2016	Efektivitas Kinerja
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00	87,91	90,60	0,97

Dari hasil pengukuran di atas, terlihat bahwa efektivitas capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan P2SDM menurun (efektivitas < 1). Hal ini disebabkan karena pada adanya perubahan sistem

penilaian SAKIP di Tahun 2017 dimana seluruh Eselon I lingkup KLHK mengalami penurunan nilai SAKIP dengan penggunaan instrument penilaian yang sama berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

c. Efisiensi Capaian Kinerja

Pengukuran efisiensi capaian kinerja sasaran Tahun 2017 dilakukan melalui perbandingan antara capaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran Tahun 2017. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui efisiensi capaian kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2017.

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian kinerja fisik tahun berjalan}}{\text{Capaian kinerja keuangan tahun berjalan}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan ≥ 1 maka pelaksanaan capaian sasaran termasuk katagori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan capaian kinerja sasaran kurang efisien. Efisiensi Capaian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM disajikan sebagaimana Tabel 16.

Tabel 16. Efisiensi Capaian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017

No	Indikator	Output Kegiatan	% Realisasi fisik 2017	% Realisasi Anggaran 2017	Efisiensi Kinerja
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00	100	99,77	1,00

Dari hasil pengukuran di atas menunjukkan bahwa rasio efisiensi kinerja Sekretariat Badan P2SDM termasuk dalam kategori efisien (nilai rasio efisiensi

≥ 1). Hal ini berarti Sekretariat Badan P2SDM telah efisien dalam menggunakan anggaran untuk capaian kinerja.

d. Rasio realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang ada pada renstra Sekretariat Badan P2SDM menunjukkan bahwa realisasi belum memenuhi target yang ditetapkan. Secara rinci rasio/perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah disajikan sebagaimana Tabel 17.

Tabel 17. Rasio Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	Realisasi 2017	Satuan	Target					% Capaian
					2015	2016	2017	2018	2019	
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Badan P2SDM	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00	72,09	Poin	80	81	82	83	84	87,91

5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2017 pada Sekretariat Badan P2SDM dilakukan untuk seluruh output kegiatan pada Penetapan Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 dan tertuang dalam dokumen RKA-KL Satuan Kerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 mencakup output kegiatan. Sekretariat Badan P2SDM menetapkan 1 (satu) indikator kinerja pada Tahun 2017 yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Badan P2SDM Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 Poin pada Tahun 2019. Pada Tahun anggaran 2017 target indikator kinerja Sekretariat Badan P2SDM adalah



SAKIP dengan nilai 82 Poin. Pengukuran kinerja atas indikator ini didasarkan pada hasil penilaian Itjen atas SAKIP Badan P2SDM Tahun 2016 sebesar 72,09 Poin. Dari penilaian tersebut diperoleh capaian kinerja Sekretariat Badan Tahun 2017 adalah 87,91%. Capaian kinerja Satker Sekretariat Badan P2SDM tidak sesuai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain:

1. Capaian output kinerja didasarkan pada nilai SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, sehingga capaiannya sangat tergantung dari penilaian pihak lain. Sementara capaian penyerapan anggaran dikendalikan oleh Satker sehingga capaian penyerapan anggaran dapat dikontrol/dimonitor oleh Satker yang bersangkutan.
2. Dasar hukum penilaian kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tahun 2017 tetap menggunakan Peraturan Menpan RB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), namun dalam pelaksanaannya, terdapat sistem penilaian baru yang belum disosialisasikan oleh Inspektorat Jenderal kepada semua eselon I Kementerian LHK. Hal ini dapat diindikasikan dengan tren menurunnya nilai SAKIP hampir semua eselon I lingkup Kementerian LHK yang selengkapnya sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 18. Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Kementerian LHK Tahun 2016-2017

No	Eselon I	Nilai Evaluasi 2016			Nilai evaluasi 2017		
		Nilai	Predikat	Interpretasi	Nilai	Predikat	Interpretasi
1	DITJEN PHPL	88,19	A	Memuaskan	70,89	BB	Sangat Baik
2	DITJEN PDASHL	84,47	A	Memuaskan	71,52	BB	Sangat Baik
3	DITJEN KSDAE	83,11	A	Memuaskan	70,26	BB	Sangat Baik
4	DITJEN PTKL	73,90	BB	Sangat Baik	71,25	BB	Sangat Baik
5	BADAN LITBANG DAN INOVASI	85,33	A	Memuaskan	71,97	BB	Sangat Baik
6	BADAN P2SDM	90,60	AA	Sangat Memuaskan	72,09	BB	Sangat Baik
7	DITJEN PHLHK	75,98	BB	Sangat Baik	70,49	BB	Sangat Baik
8	DITJEN PSKL	79,05	BB	Sangat Baik	70,40	BB	Sangat Baik

No	Eselon I	Nilai Evaluasi 2016			Nilai evaluasi 2017		
		Nilai	Predikat	Interpretasi	Nilai	Predikat	Interpretasi
9	DITJEN PPI	51,08	CC	Cukup	69,10	B	Baik
10	DITJEN PSLB3	75,82	BB	Sangat Baik	68,87	B	Baik
11	DITJEN PPKL	80,68	A	Memuaskan	69,01	B	Baik
12	ITJEN	83,22	A	Memuaskan	72,29	BB	Sangat Baik
13	SETJEN	72,05	BB	Sangat Baik	72,06	BB	Sangat Baik

3. Sebagai bahan perbandingan lain adalah menurunnya nilai SAKIP Badan P2SDM pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan nilai SAKIP 2 tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19. Perbandingan Hasil Evaluasi SAKIP Badan P2SDM Tahun 2015-2017

No	Tahun	Nilai SAKIP BP2SDM	Predikat	Interprestasi
1	2015	95,43	AA	Sangat Memuaskan
2	2016	90,60	AA	Sangat Memuaskan
3	2017	72,09	BB	Sangat Baik

Adapun Indikator kinerja Sekretariat Badan P2SDM tersebut dicapai melalui 3 (tiga) output kegiatan yaitu:

- 1) Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal "SAKIP" dengan nilai minimal 82,00 Poin
- 2) Layanan Internal
- 3) Layanan Perkantoran

Evaluasi dan analisis capaian kinerja pada indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 20. Output, Outcome dan Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 Poin"

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Output Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Outcome	Dampak
1.	Terselenggaranya tugas dan fungsi Badan P2SDM Kehutanan berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 Poin	1. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal "SAKIP" dengan nilai minimal 81,00 Poin	1. Tata Kelola di Bagian Program dan Kerjasama	16 Laporan	16 Laporan	100	<p>a. Tercapainya target kinerja dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan P2SDM sesuai sasaran yang telah ditetapkan</p> <p>b. Terlaksananya kegiatan Badan P2SDM secara terarah, sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap dari masyarakat sebagai hasil dari penyuluhan dan meningkatnya kualitas SDM.</p> <p>c. Terlaksananya Rencana Kerja Tahun 2017 sebagai pedoman arah dan kebijakan penyelenggaraan program/kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM</p>	



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Output Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Outcome	Dampak
				2. Tata Kelola di Bagian Keuangan dan Umum	13 Laporan	13 Laporan	100	<p>pada Tahun 2017 sesuai dokumen Rencana Kerja Tahun 2017</p> <p>d. Terlaksananya kegiatan pembangunan penyuluhan sesuai dengan masterplan penyuluhan dan pengembangan SDM.</p> <p>e. Terlaksananya kegiatan pembangunan penyuluhan dan pengembangan SDM Tahun 2017 sesuai dengan RKAK/L tahun 2017.</p> <p>f. Terlaksananya kegiatan Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 sesuai dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2017.</p> <p>a. Tercapainya peningkatan kualitas laporan administrasi umum, keuangan, sesuai dengan ketentuan.</p>	



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Output Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Outcome	Dampak
				3. Tata Kelola di Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi	49 Laporan	49 Laporan	100	<p>b. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pembinaan administrasi umum, administrasi keuangan dan administrasi perlengkapan</p> <p>a. Terarahnya kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan karena mendapat <i>feed back</i> dari hasil monitoring dan evaluasi.</p> <p>b. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan</p>	<p>- Para Satker lingkup Badan P2SDM memantau capaiannya secara mandiri, melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang tidak tercapai dan mereskedul ulang kegiatan yang belum tercapai serta melakukan bimbingan ke Satker yang rendah capaiannya untuk langkah- langkah percepatan.</p> <p>- Untuk memacu Satker lingkup Badan P2SDM dalam upaya percepatan capaian</p>



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Output Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Outcome	Dampak
								<p>penyuluhan dan pengembangan SDM dengan adanya <i>feed back</i> dari hasil monitoring dan evaluasi.</p> <p>c. Tersusunnya LKj Sekretariat Badan P2SDM dan LKj Badan P2SDM.</p> <p>d. Meningkatnya kinerja penyusunan perencanaan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM dengan didukung data statistik yang baik dan benar.</p> <p>e. Terkelolanya website Badan P2SDM.</p> <p>f. Terkelolanya majalah penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan Online</p>	<p>IKP, IKK dan penyerapan anggaran pada tahun 2015 sehingga target IKP, IKK dan anggaran yang telah dialokasikan dapat tercapai dan terukur outcomenya.</p> <p>- Akuntabilitas Kinerja Badan P2SDM dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi teknis maupun keuangan</p> <p>- Data dan informasi yang valid</p>



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Output Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Outcome	Dampak
				4. Tata Kelola di Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi	11 Laporan	11 Laporan	100	<ul style="list-style-type: none"> g. Meningkatnya pemahaman kebijakan pusat dan pengelolaan dana dekonsentrasi penyuluhan h. Tersusunnya buku tentang keberhasilan/Success story Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM kehutanan i. Tercapainya penyebaran informasi kegiatan penyuluhan kehutanan, kediklatan dan program kehutanan lainnya kepada Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat a. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia b. Meningkatnya pemahaman Kepala Sekolah, pengelola kepegawaian dan Guru 	- Acuan bagi setiap eselon I lingkup kementerian Lingkungan Hidup



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Output Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Outcome	Dampak
								mengenai mekanisme dan pengelolaan jabatan fungsional Guru c. Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM sebagaimana akibat adanya peraturan yang disusun.	dan Kehutanan dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah dibidang Lingkungan Hidup dan kehutanan
			2. Layanan Internal		1 Layanan	1 Layanan	100,00	Tertatanya ruang kerja dan ruang rapat menjadi lebih rapi dan nyaman	
			3. Layanan Perkantoran		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100,00	Terlaksananya kegiatan perkantoran yang efektif dan efisien.	Meningkatnya pelayanan kegiatan operasional dan perkantoran



Rincian unit kegiatan untuk mewujudkan pencapaian IKK Sakter Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

5.1 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Lingkungan Badan P2SDM Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal "SAKIP" dengan nilai minimal 82,00 Poin

Output kegiatan ini memiliki 4 (empat) elemen kegiatan yaitu : 1) Tata Kelola di Bagian Program dan Kerjasama; 2) Tata Kelola di Bagian Keuangan dan Umum; 3) Tata Kelola di Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi; 4) Tata Kelola di Bagian kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana. Capaian untuk output kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal "SAKIP" dengan nilai minimal 82 Poin sebesar 100% dengan realisasi capaian keuangan sebesar Rp9.737.128.648,00 dari target sebesar Rp9.761.956.000,00 atau sebesar 99,75%.

Evaluasi dan analisis elemen kegiatan dari output kegiatan kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal "SAKIP" dengan nilai minimal 82 Poin adalah sebagai berikut:

1) Tata Kelola di Bagian Program dan Kerjasama

Secara rinci elemen kegiatan Tata Kelola di Bagian Program dan Kerjasama dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018.

Dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2018 merupakan instrumen dasar untuk kerangka kerja, perkiraan pembiayaan pembangunan kehutanan bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada Tahun 2018. **Output** dari kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah tersusunnya dokumen perencanaan tahunan (Rencana Kerja Tahun 2018) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Badan P2SDM Tahun 2015 – 2019.

Outcome dari kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah Terlaksananya Rencana Kerja Tahun 2018 sebagai pedoman arah dan kebijakan penyelenggaraan program/kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pada Tahun 2018 sesuai dokumen Rencana Kerja Tahun 2018.



Gambar 2. Renja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2018

Kegiatan ini terealisasi sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp216.942.100,00 atau sebesar 99,11% dari target anggaran sebesar Rp218.894.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

b. Workshop Penyusunan Dokumen Perencanaan P2SDM

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam kepada setiap pejabat/petugas yang menangani perencanaan program/kegiatan dan pengelola dipa lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM tentang RKP Tahun 2018 yang akan digunakan sebagai pedoman sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada saat menjabarkan PN ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan prinsip *money follow program*.

Output dari kegiatan Workshop Penyusunan Dokumen Perencanaan P2SDM adalah tersedianya pejabat/ petugas perencanaan program dan anggaran yang lebih berintegritas dan profesional. **Outcome** dari kegiatan ini adalah terciptanya sistem perencanaan yang baik dan terarah. Sedangkan dampak dari kegiatan ini adalah terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik karena perencanaanya tersusun secara baik.



Gambar 3. Narasumber Kementerian PPN/Bappenas

Kegiatan ini terealisasi sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp207.667.889,00 atau 99,70% dari target sebesar Rp208.288.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

c. Workshop Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Lingkup Badan P2SDM Tahun 2017

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi Satker lingkup Badan P2SDM lebih memahami perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan meningkatkan kapasitas SDM di tingkat tapak khususnya dalam pengembangan pendidikan. **Output** yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah setiap Satker lingkup Badan P2SDM dapat merancang kegiatan dan anggaran yang sudah terinternalisasi konsep responsif gender.



Gambar 4. Penyusunan Anggaran Responsif Gender dan Penyusunan TOR Gender Budget Statement di Aula Dormitori Puslatmas & PGL

Kegiatan ini terealisasi sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp90.609.800,00 atau 99,36% dari target sebesar Rp91.194.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

d. Dokumen Penetapan Kinerja Lingkup Badan P2SDM Tahun 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka Sekretariat Badan P2SDM menyusun dokumen Penetapan Kinerja unit Badan P2SDM. Dokumen Penetapan kinerja lingkup Badan P2SDM Tahun 2017 berisi target kinerja tahunan lingkup Badan P2SDM.

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen penetapan kinerja lingkup Badan P2SDM. **Outcome** dari kegiatan ini adalah terwujudnya target kinerja tahunan lingkup Badan P2SDM dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kegiatan ini telah terealisasi sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp88.456.800,00 atau 99,87% dari target anggaran sebesar Rp88.571.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

e. Bimbingan Teknis dalam rangka Pelaksanaan Program dan Kegiatan Ke- DIPA- an Tahun 2017

Kegiatan Bimbingan Teknis Program dan Kegiatan ke-DIPA-an Tahun 2017 lingkup Badan P2SDM dilaksanakan di Pusat Diklat SDM LHK, Jl. Mayjend Ishak Djuarsa Bogor. Bimbingan teknis ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 25 sampai 26 Januari 2017. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pengelola kegiatan dan anggaran DIPA Tahun 2017 lingkup Badan P2SDM sehingga SDM yang menangani perencanaan program dan

kegiatan ke-DIPA-an lebih memahami tentang tata cara penyusunan kegiatan dan anggaran hingga penyusunan laporan dan evaluasi kinerja.



Gambar 5. Paparan dari Pusat Diklat SDM LHK

Output kegiatan ini adalah tersedianya pejabat/petugas perencanaan program dan anggaran yang lebih kompeten, berintegritas, dan profesional.

Outcome kegiatan ini adalah adalah terkelolanya kegiatan dan anggaran DIPA tahun 2017 yang baik di tiap-tiap Satker lingkup BP2SDM. Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp96.611.500,00 atau 99,79% dari target anggaran sebesar Rp96.812.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

f. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

Petunjuk Operasional Kegiatan atau disingkat POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Penyusunan ini digunakan sebagai dokumen acuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Tahun 2017 telah terjadi revisi anggaran sebanyak 11 kali (DJA 2 kali dan Kanwil DJPB 9 kali).

Output kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen operasional petunjuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Badan P2SDM pada Tahun Anggaran 2017. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah tercapainya target kinerja

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan P2SDM sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp11.325.000, atau 100% dari target anggaran sebesar Rp11.325.000,00/ Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

g. Penyusunan RKAKL BP2SDM Tahun 2018

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas dalam penyusunan anggaran yang dilakukan setiap tahun dan memberi keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam RKA-K/L.

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya RKA-K/L,TOR/RAB/KAK Tahun 2018 pada 17 Satker. Outcome dari kegiatan ini adalah adanya kepastian anggaran Badan P2SDM Tahun 2018.



Gambar 6. Penyampaian materi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari Kementerian PPN/Bappenas

Kegiatan ini terealisasi sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp322.727.200,00 atau 99,80% dari target sebesar Rp323.382.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori efisien.

h. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bersama Kemenkeu dalam rangka Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Komponen terbesar dari kegiatan bimbingan teknis ini adalah penyampaian mengenai tata cara revisi anggaran yang didampingi oleh pihak-pihak pemangku kepentingan anggaran dari Kementerian lain seperti pemangku kepentingan dari Direktorat Jenderal Anggaran, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Biro Perencanaan Kementerian LHK. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan kunjungan langsung kepada setiap Satker lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM di daerah untuk memberikan arahan, bimbingan dan pembinaan teknis penyusunan anggaran tahun anggaran 2017 maupun untuk tahun anggaran selanjutnya.

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bersama Kemenkeu dalam rangka Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran. **Outcome** dari Bimbingan Teknis ini adalah terbentuknya kesamaan persepsi dan meningkatnya keterampilan petugas/operator RKA-K/L dalam penyusunan usulan rencana anggaran sehingga menghasilkan RKA-K/L dan kelengkapan data dukung lainnya secara baik dan benar.

Kegiatan ini telah terealisasi sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp166.772.299,00 atau 99,47% dari target anggaran sebesar Rp167.653.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

i. Rapat Pencermatan dan Penelahaan Proses Revisi RKAKL DIPA BP2SDM

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran agar usulan kegiatan anggaran masing-masing Satker sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan, jenis kegiatan dan akun sehingga memberi keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam RKA-K/L.

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya usulan revisi RKA-K/L, TOR/RAB/KAK Tahun 2017 pada 17 Satker lingkup Badan P2SDM, dan tersusunnya Catatan Hasil Reviu (CHR) sebagai salah satu kelengkapan



dokumen usulan revisi anggaran. **Outcome** dari kegiatan ini adalah adanya kepastian dokumen anggaran lingkup Badan P2SDM Tahun 2017.

Gambar 7. Penelaahan revisi RKA-K/L oleh Tim Inspektorat Jenderal

Kegiatan ini telah terealisasi sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp103.702.000,00 atau 99,77% dari target anggaran sebesar Rp103.936.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

j. Bimbingan Teknis dan Penyegaran bagi Operator RKAKL Lingkup BP2SDM

Dalam mempersiapkan dokumen-dokumen terkait penyusunan rencana kerja dan anggaran setelah proses penghematan/pemotongan Belanja Kementerian Lembaga dalam pelaksanaan APBN-P TA. 2017, maka diadakan Bimbingan Teknis bagi Petugas Perencanaan Program dan Anggaran lingkup Badan P2SDM Tahun 2017 guna meningkatkan keterampilan petugas pengelola perencana usulan anggaran sehingga menghasilkan dokumen penyusunan rencana kegiatan dan anggaran yang berkualitas sebagai salah satu data dukung kelengkapan dokumen anggaran.

Bimbingan teknis ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengelola perencana usulan anggaran pada masing-masing Satker lingkup Badan P2SDM.



Gambar 8. Diskusi Peserta Bimbingan Teknis dengan narasumber

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis dan Penyegaran bagi operator RKAKL Lingkup BP2SDM. **Outcome** dari kegiatan ini adalah terciptanya operator RKAKL lingkup Badan P2SDM yang handal.

Kegiatan ini terealisasi sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp144.429.000,00 atau 99,50% dari target sebesar Rp145.149.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

k. Kerjasama dengan Stakeholders

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi di antara para pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan kerjasama baik di lingkup instansi pemerintah dan non pemerintah yang terkait dengan kegiatan kerjasama. Pengelolaan kerjasama yang lebih baik diharapkan dapat mendorong bentuk-bentuk kegiatan kerjasama lain yang lebih prospektif.

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya rencana kerjasama dan draft naskah kerjasama serta terlaksananya kegiatan kerjasama bidang penyuluhan dan pengembangan SDM. **Outcome** kegiatan ini adalah bertambahnya pihak yang bekerjasama dalam rangka mendukung penyuluhan dan pengembangan SDM, meningkatnya kapasitas SDM, dan lebih efektifnya kegiatan penyuluhan.

Kegiatan Kerjasama dengan Stakeholder pada Tahun 2017 antara lain:

1. Implementasi kerjasama bidang pendidikan bagi karyasiswa SDM KemenLHK pada program studi Litigasi UGM.
2. Penyusunan draft naskah kerjasama bidang Pengembangan SDM Aparatur daerah dengan Kementerian Dalam Negeri.
3. Penyusunan draft Naskah kerjasama bidang Pengembangan SDM (Program Profesi Insinyur) dengan Kemeristekdikti.
4. Penyusunan Modul Perhutanan Sosial dalam rangka mendukung percepatan perhutanan sosial untuk membuka peluang kerjasama bidang penyuluhan dengan stakeholder



Gambar 9. Penyusunan Draft Naskah Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri

Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp310.950.916,00 atau 99,73% dari target sebesar Rp311.795.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

I. Kerjasama Internasional

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka peningkatan penyuluhan dan kapasitas sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan dalam pengelolaan lingkungan hidup kehutanan, memperkuat *networking* dan *sharing*

informasi dalam pengembangan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan di tingkat internasional.

Tujuan kerjasama bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK antara lain:

1. Membentuk kerjasama yang terpadu terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Republik Indonesia dengan kegiatan yang sejenis di negara-negara lain maupun organisasi internasional yang terkait.
2. Melaksanakan kegiatan kerjasama yang sudah terjalin sesuai program kegiatan yang terdapat dalam naskah kerjasama.
3. Mengembangkan kerjasama yang telah terbentuk untuk kedepannya dapat dijadikan program andalan.

Output kegiatan ini adalah tersusunnya draft naskah kerjasama baru dan draft naskah perpanjangan kerjasama dengan instansi di tingkat internasional serta terlaksananya kegiatan kerjasama internasional.

Outcome kegiatan ini adalah bertambahnya pihak yang bekerjasama di tingkat internasional dalam rangka mendukung kegiatan terkait penyuluhan dan pengembangan SDM LHK, meningkatnya kapasitas SDM LHK melalui implementasi kerjasama, kegiatan penyuluhan dapat berjalan lebih efektif melalui implementasi kegiatan kerjasama internasional.

Kegiatan kerjasama internasional yang telah dilaksanakan oleh Badan P2SDM antara lain :

1. Asia-Pacific Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation (APFNet)

Fokus kegiatan APFNet yaitu terkait isu rehabilitasi lahan dan pengelolaan hutan lestari yang meliputi Pembangunan Kelembagaan dan Perencanaan, Kemitraan, Dialog Kebijakan, Keproyekan dan Program, Pembangunan Kapasitas dan Saling berbagi informasi (Information Sharing), Rehabilitasi, Good Model and Good Practices.

Project proposal yang disusulkan untuk program APFNet tahun 2017 berasal dari Badan Litbang dan Inovasi dengan judul

"Improving Capacities Towards Reducing Greenhouse Gas Emissions From Peat Swamp Forest Fires In Indonesia".

2. Kegiatan Kerjasama dengan Food and Agriculture Organization (FAO)
Kerjasama dengan FAO ini dilakukan untuk mendorong kerjasama yang menjadi prioritas Kementerian Kehutanan (pada saat itu) yaitu terkait kesatuan pengelolaan hutan. Output 1 dari project ini yaitu 1) Pemetaan SDM KPH 2) Pengembangan Kurikulum E-Learning berdasarkan hasil pemetaan 3) Pelaksanaan Sekolah Lapang bagi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Lebah Madu 4) Persiapan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di KPH. Sedangkan pelaksanaan output 2, 3 dan 4 direncanakan di tahun 2018 dimana Project FAO ini akan berakhir pada bulan Juni 2018.



Gambar 10. Dissemination & Validation Workshop dengan FAO

3. Forest Investment Program (FIP)

Nama dari Project FIP II ini adalah *Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development* dengan jangka waktu selama 2 tahun.

Ditjen Planologi Kehutanan ditunjuk sebagai executing agency dan Badan P2SDM merupakan salah satu implementing agency yang menangani peningkatan kapasitas SDM. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah revisi anggaran pelaksanaan Project Peningkatan Kapasitas SDM. Project akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperkirakan akan berakhir pada tahun 2020.

4. Kerjasama dengan JICA

JICA akan melaksanakan *Project for Environmental Education Model Development Focused on River Improvement and Waste Management in Deli River Basin of North Sumatera Province* bekerjasama dengan BLHD Provinsi Sumatera Utara dan berkoordinasi dengan Pusat Pelatihan Masyarakat dan PGL sejak akhir tahun 2016.

Pada Tahun 2017, telah dilakukan beberapa kali pembahasan perbaikan draft naskah kerjasama sesuai arahan dari Biro KLN dan Biro Perencanaan KLHK. Pada akhir 2017 Sekretariat BP2SDM telah bersurat kepada DLHD Sumut dan JICA untuk memperbaiki draft final naskah kerjasama dengan poin yang harus ditambahkan yaitu rincian anggaran biaya project JICA, kesepakatan untuk menyampaikan laporan triwulan project kepada Sekretariat BP2SDM dan dampak dari project tersebut.

5. Indonesia-Korean Environmental Cooperation Center (IKECC) dan Korea Environmental Industry and Technology Institute (KEITI)

Inisiasi kerjasama dengan Korea Environmental Industry and Technology Institute (KEITI) dimulai sejak tahun 2015. Pada Tahun 2017, kerjasama ini dilanjutkan dengan penawaran beasiswa program pendidikan magister untuk staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menempuh pendidikan di Korea Selatan. Setelah melewati proses pemanggilan dan seleksi dari IKECC, telah

terpilih 3 orang yaitu 1 orang dari Biro KLN dan 2 orang dari Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli.



Gambar 11. Partisipasi delegasi Badan P2SDM menghadiri APEC-VC Workshop di Seoul

Pada Bulan November 2017 Badan P2SDM menghadiri APEC-VC Workshop di Seoul yang membahas roadmap APEC-VC tahun 2018-2022 dan draft multilateral MoU antar anggota APEC-VC yang berasal dari Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, dan Indonesia. Akhir 2017 Draft MoU tersebut telah disampaikan ke Biro KLN untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, kerjasama multilateral dalam keanggotaan APEC-VC tidak dapat dilaksanakan penandatanganan oleh Indonesia mengingat kebijakan politik internasional Indonesia yang menganut "One China Policy". Selanjutnya draft MoU tersebut oleh Biro KLN telah diteruskan ke Kementerian Luar Negeri.

6. Kerjasama dengan Sakado

Bentuk Kegiatan yang telah dilakukan dalam kerjasama tersebut antara lain:

- (1) Program beasiswa jenjang Strata-1 (S1) bagi lulusan SMK Kehutanan di University of Tsukuba, Jepang. Tahun 2016 3 orang siswa SMKK menerima beasiswa di University of Tsukuba.
- (2) Keikutsertaan siswa dan guru SMK Kehutanan pada Annual Meeting *ESD Symposium* di Jepang yang dilaksanakan setiap

tahun. Tahun 2017 dilaksanakan tanggal 4-9 November di Tokyo.

- (3) Pertukaran Siswa SMK Kehutanan dengan Siswa UTSS. Pada Tahun 2017 1 orang siswa UTSS mengikuti pembelajaran di SMKK Kadipaten sejak Juli 2017.
- (4) Field Work setiap bulan Agustus di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan pertemuan *Super Global Highschool* (SGH) hasil Field Work di Jakarta. Pada tahun 2017, Fieldwork di TNGGP dilaksanakan tanggal 1-8 Agustus 2017 dan pertemuan SGH dilaksanakan 10 Agustus 2017 di Manggala Wanabakti.
- (5) *Students Leader Meeting* setiap akhir tahun di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tahun 2017 dilaksanakan tanggal 29 Desember 2017 di Balai Besar TNGGP.

7. Kerjasama Timor Leste

Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah pemberian beasiswa kepada 5 orang siswa Republik Demokratik Timor Leste untuk belajar di SMKKN Pekanbaru, sedangkan pelaksanaan Diklat Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan belum dapat diimplementasikan karena belum adanya peserta yang diusulkan dari Pemerintah Timor-Leste.

8. Kerjasama UNDP

Bentuk dari kerjasama ini adalah pelaksanaan diklat mengenai *Community Based Forest Fire Management* di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan dan pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan yang tidak hanya menjadi tanggungjawab dari pemerintah tetapi juga masyarakat sekitar hutan.

9. Kerjasama NCF

NCF adalah koperasi/badan usaha dibawah koordinasi Korea Forest Service (KFS) yang bergerak dalam bidang bisnis dan



pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kerjasama yang ditawarkan adalah peningkatan kapasitas SDM Penyuluhan dan Pengembangan SDM khusus SDM kelembagaan KTH.

Kegiatan Kerjasama Internasional terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp482.788.772,00 atau 99,49% dari target anggaran sebesar Rp485.243.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

m. Pembinaan Bidang Kerjasama (Pengelolaan Hibah, Dokumen Perijinan, MOU)

Dalam kegiatan ini diharapkan para pihak yang bekerjasama memahami perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan hibah, dokumen perjanjian dan MoU sehingga terwujud optimalisasi pemanfaatan dana hibah dan kerjasama lainnya dalam rangka menunjang capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Output kegiatan ini yaitu terdokumentasikannya laporan hibah kerjasama dengan baik, teradministrasinya dokumen perjanjian kerjasama dengan baik dan terbinanya implementasi kerjasam dengan baik. **Outcome** kegiatan ini yaitu memberikan kontribusi laporan hibah kepada Biro Perencanaan sebagai laporan Kementerian Keuangan atas penerimaan Negara dari hibah luar negeri. Outcome lainnya yaitu terlaksananya tata kelola pemerintah dengan baik melalui tertib administrasi hibah, dokumen perjanjian dan Mou.

Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp125.397.700,00 atau 99,70% dari target sebesar Rp125.777.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

n. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Lingkup Badan P2SDM

Monitoring dan Evaluasi Kerjasama untuk tahun 2017 dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi Perjanjian Kerjasama dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 25-26 Oktober 2017 bertempat di Hotel Ibis, JL. Letjen S. Parman, Slipi- Jakarta yang dihadiri oleh seluruh Kepala Pusat Lingkup BP2SDM, Sekretaris BPSDM Kemendagri, serta beberapa Badan PSDM Provinsi.

Output dari kegiatan ini adalah terpantaunya dan terevaluasinya kerjasama lingkup Badan P2SDM sehingga dapat teridentifikasi manfaat kerjasama yang telah dilakukan oleh Badan P2SDM. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu dapat melanjutkan kerjasama yang bermanfaat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta dapat menghentikan kerjasama yang tidak dapat berjalan maupun yang tidak ada manfaatnya.

Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp167.401.200,00 atau 99,61% dari target sebesar Rp169.762.000,00.

2) Tata Kelola di Bagian Keuangan dan Umum

Elemen kegiatan ini terdiri dari 13 kegiatan dengan target 13 laporan dan realisasi 13 laporan atau sebesar 100%. Realisasi anggaran elemen kegiatan ini sebesar Rp2.015.629.943,00 (atau 99,75% dari target sebesar Rp2.020.720.000,00. Secara rinci capaian elemen kegiatan Tata Kelola di Bagian Keuangan dan Umum adalah sebagai berikut :

a. Pembinaan Administrasi Umum

Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan pengembangan administrasi umum yang dibutuhkan dalam administrasi organisasi serta mensosialisasikan kebijakan terbaru dari organisasi di tahun 2017. **Output** dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan administrasi umum persuratan sesuai dengan tata naskah dinas. Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 207.625.000,00 atau 99,60% dari target sebesar Rp208.467.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik

kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

b. Penata Usahaan Persuratan

Kegiatan penatausahaan persuratan ini meliputi pencatatan surat serta pendokumentasian surat lingkup Sekretariat Badan dan Badan P2SDM dari Bulan Januari – Desember Tahun 2017. Hasil dokumentasi surat lingkup Sekretariat Badan P2SDM tahun 2017, terdapat 3.872 surat masuk dan 3.314 surat surat keluar. Adapun surat lingkup Badan P2SDM sebanyak 3.841 surat masuk dan 433 surat keluar.

Kegiatan terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp153.155.250,00 atau 99,53% dari target anggaran Rp153.874.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

c. Operasional Pimpinan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulannya berupa perjalanan Kepala Badan dan Sekretaris Badan P2SDM dalam melakukan pembinaan bidang Penyuluhan dan pengembangan SDM. **Output** dari kegiatan ini adalah terselenggaranya operasional pimpinan. Kegiatan terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp86.826.755,00 atau 99,64% dari target anggaran Rp87.144.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

d. Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 Lingkup BP2SDM

Kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 Tingkat Eselon I BP2SDM dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender dari tanggal 24 s/d 26 Januari 2017 bertempat di Royal Hotel, Jl. Ir.H.Djuanda No. 53 Bogor.

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan keuangan Eselon I yang berkualitas, transparan dan akuntabel. **Outcome** dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh laporan keuangan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 12. Konsolidasi dengan Biro Keuangan dan DJPB

Kegiatan terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp189.974.550,00 atau 99,84% dari target anggaran Rp190.277.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

e. Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tahun 2017
Lingkup BP2SDM

Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017 (SAIBA, Barang Persediaan dan SIMAK BMN) Tingkat Eselon I Badan P2SDM dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender dari tanggal 18 s/d 20 Juli 2017 bertempat di di Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, Jalan Raya Puspitek Gd. 211 Lantai 2 Kota Tangerang Selatan.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017 (SAIBA, Barang Persediaan dan SIMAK BMN) Tingkat Eselon I Badan P2SDM adalah sebagai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tingkat Eselon I lingkup BP2SDM.



Gambar 13. Peserta Konsolidasi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan keuangan semester I Tahun 2017. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas laporan keuangan lingkup Badan P2SDM menjadi laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan ini terealisasi sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp131.583.700,00 atau 99,61% dari target sebesar Rp131.283.700,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

f. Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Keuangan untuk memperoleh laporan keuangan yang akuntabel sehingga diperoleh opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017.

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan keuangan lingkup Badan P2SDM. **Outcome** dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas laporan keuangan Badan P2SDM sehingga diperoleh opini WTP.

Kegiatan ini terealisasi sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp436.853.350,00 atau 99,89% dari target sebesar Rp437.321.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan BPK RI/Inspektorat Jenderal/Administrasi Keuangan Hibah/Tindak Lanjut TP/TGR lingkup Badan P2SDM

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan BPK RI, Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal, Hibah, dan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai bahan untuk menyusun Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Badan P2SDM yang berkualitas, akuntabel, dan transparan dalam pengelolaan Keuangan Negara.

Output dari kegiatan ini adalah laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut temuan BPK RI/Inspektorat Jenderal/Administrasi Keuangan Hibah/Tindak Lanjut TP/TGR lingkup Badan P2SDM. **Outcome** dari kegiatan ini adalah terselesaikannya tindak lanjut temuan BPK RI maupun Inspektorat Jenderal lingkup BP2SDM dan pengelolaan administrasi hibah dan TP/TGR.

Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp189.446.356,00 atau 99,84% dari target sebesar Rp189.752.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

h. Penyusunan Laporan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Lingkup BP2SDM

Laporan Barang Milik Negara (LBMN) periode Tahun Anggaran 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh Barang Milik Negara yang dikelola oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Laporan BMN ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Sistem ini merupakan sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. SIMAK BMN ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.



Gambar 14. Pelabelan pada asset BMN

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan Akuntansi BMN lingkup Badan P2SDM. Sedangkan **outcome** kegiatan ini adalah tersajinya informasi BMN bagi pengguna barang dan kuasa pengguna barang untuk melaksanakan tugas-tugas manajerialnya.

Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp231.275.732,00 atau 99,73% dari target sebesar Rp231.900.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

i. Rapat Koordinasi Tim Sekretariat ULP dan Pokja ULP

Kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik pelaksanaan pengadaan barang/jasa Unit Kerja Pusat lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM selama periode Tahun 2017. Rencana Umum Pengadaan (RUP) Unit Pusat Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah dilakukan pengumuman melalui Sistem Rencana Umum Pengadaan (Sirup).

Rencana kegiatan pengadaan barang/jasa pada masing-masing satuan kerja (Satker) sebagai berikut:

1. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 - a) Pengadaan Perlengkapan Ruang Rapat
 - b) Pengadaan Peralatan Elektronik
 - c) Pengadaan partisi ruang Blok 4 lantai 7 dan ruang arsip Pusdiklat SDM LHK Bogor.
2. Pusat Penyuluhan
 - a) Pembelian update aplikasi Simluh
 - b) Pembelian update aplikasi Simpro
 - c) Pembelian update aplikasi Cyberextension
 - d) Pembuatan Materi Penyuluhan Elektronik
 - e) Pengadaan baju penyuluh lingkungan hidup dan kehutanan
3. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM
 - a) Pengadaan meubeler dan lemari rak kecil
 - b) Pengadaan laptop dan printer
 - c) Pengadaan partisi ruang blok 7 lantai 12
 - d) Pengadaan papan nama PUSRENBANG SDM blok 7 lantai 4
 - e) Pengadaan update sofwar uji kompetensi
 - f) Pengembangan program website bakti rimbawan secara online
4. Pusat Pendidikan dan Latihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - a) Pengadaan Mobil Dinas Pejabat Eselon II
 - b) Pengadaan konsumsi peserta diklat penilai sumber benih tanaman hutan
 - c) Pengadaan konsumsi peserta diklat MOT
 - d) Pengadaan konsumsi peserta diklat TOC



- e) Pengadaan konsumsi peserta diklat ECSCS TEST
 - f) Pengadaan seragam pramubakti
5. Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan
- a) Pengadaan piala adiwiyata
 - b) Pengadaan personal use pelatihan pengenalan Saka Kalpataru DAS Toba
 - c) Pengadaan konsumsi pelatihan pengenalan saka wanabakti DAS Cisadane
 - d) Pengadaan konsumsi pelatihan PPLH Kader LHK di DAS Siak Bagian Tengah (Pekanbaru)

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan barang jasa antara lain:

- Proses pengadaan barang/jasa belum sepenuhnya dipahami oleh kelompok kerja (pokja) dan pejabat pengadaan sehingga mengakibatkan: format dokumen tidak seragam dan atau belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 serta lemahnya tata waktu pelaksanaan proses pengadaan.
- Adanya pencermatan rasionalisasi DIPA Tahun 2016 mengakibatkan adanya revisi kegiatan termasuk didalamnya pengadaan barang/jasa

Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp75.360.850,00 atau 99,49% dari target anggaran sebesar Rp75.748.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

j. Pengadaan Peralatan Ruang Rapat

Kegiatan pengadaan perlengkapan ruang rapat memiliki target 36 unit dengan realisasi 36 unit dengan capaian kegiatan 100%. Realisasi dari pengadaan perlengkapan ruang rapat yaitu:

- ✓ Meja pimpinan : 1 unit
- ✓ Meja kerja : 2 unit
- ✓ Meja rapat : 1 unit

- ✓ Meja staff : 3 unit
- ✓ Meja tamu : 1 unit
- ✓ Meja receptionis : 1 unit
- ✓ Meja sudut : 1 unit
- ✓ Meja dispenser : 1 unit
- ✓ Kursi pimpinan : 1 unit
- ✓ Kursi sekretaris : 1 unit
- ✓ Kursi rapat : 11 unit
- ✓ Kursi kerja : 2 unit
- ✓ Kursi hadap : 1 unit
- ✓ Sofa : 1 unit
- ✓ Lemari arsip : 1 Unit
- ✓ Credenza 1 : 1 unit
- ✓ Credenza 2 : 1 unit
- ✓ Backdrop + hambalan : 1 unit
- ✓ Lemari arsip 3 (80x220) : 1 unit
- ✓ Lemari covering : 1 unit
- ✓ Credenza 3 : 1 unit
- ✓ Credenza 4 : 1 unit

Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp109.200.000,00 atau 99,88% dari target anggaran sebesar Rp.109.335.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih kecil dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

k. Pengadaan Perlengkapan Elektronik

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan elektronik Satker Sekretariat Badan P2SDM. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja pegawai karena didukung oleh peralatan elektronik yang lengkap. Pada Tahun 2017 Sekretariat Badan P2SDM mempunyai target pengadaan perlengkapan elektronik sebanyak 17 unit dengan

realisasi sebanyak 17 unit. Pengadaan perlengkapan elektronik Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 antara lain:

- Mesin absen sidik jari: 1 unit
- Dispenser: 1 unit
- AC Standing: 1 unit
- Printer: 6 unit
- Laptop: 5 unit
- Televisi: 1 unit
- CCTV: 2 unit

Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp152.193.600,00 atau 99,89% dari target anggaran sebesar



Rp153.360.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

Gambar 15. Pengadaan mesin absensi

I. Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Kegiatan ini berupa pemeliharaan ruang Kepala Badan P2SDM dengan output berupa tersedianya ruang Kepala Badan P2SDM yang nyaman. Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.409.000,00 atau 99,04% dari target anggaran sebesar Rp9.500.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

m. Konsolidasi Rencana Kegiatan BMN Tahun 2019 Lingkup BP2SDM

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya konsolidasi rencana kegiatan BMN Tahun 2019 lingkup Badan P2SDM. Sedangkan **outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan dan keterampilan operator SIMAK BMN dalam merencanakan kebutuhan barang milik negara dan keterampilan menggunakan aplikasi SIMAN dalam penyusunan RKBMN.

Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp43.025.800,00 atau 99,48% dari target anggaran sebesar Rp43.250.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

3) Tata Kelola di Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi

Elemen kegiatan ini terdiri dari 14 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Realisasi anggaran elemen kegiatan Tata Kelola di Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi sebesar Rp2.576.986.012,00 atau 99,81% dari target anggaran sebesar Rp.2.581.855.000,00. Realisasi kegiatan ini sebanyak 49 laporan dari target 49 laporan. Secara rinci capaian elemen kegiatan Tata Kelola di Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan Website BP2SDM

Sehubungan pentingnya peran website dalam penyuluhan kehutanan, Badan P2SDM Tahun 2017 mengembangkan Website Penyuluhan dan Pengembangan SDM dengan alamat situs <http://bp2sdm.menlhk.go.id>. Pengelolaan website Badan P2SDM dimaksudkan sebagai kegiatan penyediaan informasi yang terkait penyuluhan dan pengembangan SDM, dan diperuntukkan untuk berbagai instansi baik di dalam maupun di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka menunjang program pembangunan kehutanan lainnya.

Kegiatan Pengelolaan website Badan P2SDM bertujuan untuk:

- Menyebarkan informasi berupa berita hasil program/ kegiatan, peraturan-peraturan, data SDM penyuluh, informasi kegiatan Penyuluhandan Pengembangan SDM, untuk dapat dibagipakaikan kepada berbagai stakeholder secara luas.

- Mengelola informasi berupa pengumpulan, pengolahan dan pengemasan informasi secara menarik dan informatif agar memudahkan para pengguna.



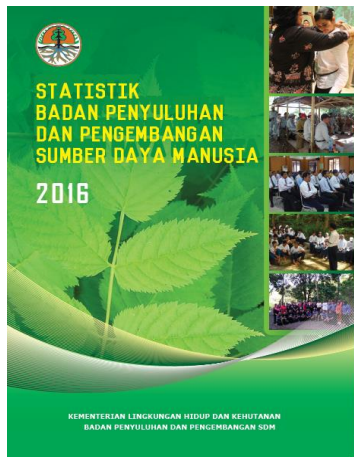
Gambar 16. Tampilan Website Badan P2SDM

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya berbagai informasi terkini terkait Badan P2SDM melalui website. **Outcome** dari kegiatan ini adalah tersampainya informasi kepada pengguna secara cepat dengan cakupan yang lebih luas.

Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp276.056.523,00 atau 99,83% dari target anggaran sebesar Rp276.514.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

b. Statistik Badan P2SDM

Kegiatan statistik Badan P2SDM merupakan kegiatan penyusunan buku statistik Badan P2SDM yang memuat tentang data-data dan informasi terkait penyuluhan dan pengembangan SDM. **Output** dari kegiatan ini adalah tersusunnya statistik Badan P2SDM Tahun 2017. **Outcome** laporan data statistik adalah meningkatnya kinerja penyusunan perencanaan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM dengan didukung data statistik yang baik dan benar.



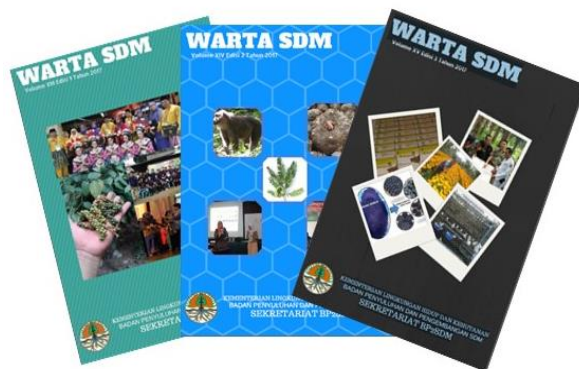
Gambar 17. Statistik Badan P2SDM Tahun 2016

Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp165.440.700,00 atau 99,99% dari target anggaran Rp165.464.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

c. Pengelolaan Majalah Elektronik Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Kegiatan ini berupa pengelolaan majalah Badan P2SDM secara elektronik. **Output** dari kegiatan ini tersedianya artikel/karya tulis tentang Penyuluhan dan Pengembangan SDM secara elektronik. **Outcome** dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah pengguna/masyarakat yang tentang kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM.

Majalah elektronik ini diberi nama E-Magazine, cyber penyuluhan kehutanan dengan alamat situs <http://bp2sdm.menlhk.go.id/emagazine>. Majalah elektronik ini merupakan media penyampaian informasi bagi para Penyuluh Kehutanan dan stakeholder penyuluhan kehutanan lainnya, untuk membagi **artikel penyuluhan** dalam meningkatkan kinerja penyuluh kehutanan di lapangan sehingga mampu mendampingi berbagai program pembangunan kehutanan.



Gambar 18. Tiga edisi majalah elektronik

Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp184.597.100,00 atau 99,88% dari target anggaran sebesar Rp184.817.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik

kegiatan sama besar apabila dibandingkan realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

d. Rapat Koordinasi Bidang Informasi, Publikasi dan Evaluasi

Rapat Koordinasi Bidang Informasi Publikasi dan Evaluasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2017 dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan penyegaran kepada Satker lingkup Badan P2SDM tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengetahuan tentang penyebaran informasi melalui berbagai media. **Output** dari kegiatan ini adalah tersusunnya desain SPIP Satker lingkup Badan P2SDM serta meningkatnya kemampuan pegawai lingkup Badan P2SDM dalam menulis berita.

Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan para



kasubag TU lingkup Badan P2SDM dalam penyusunan desain penyelenggaraan SPIP dan meningkatnya jumlah dan kualitas berita terkait Badan P2SDM.

Gambar 19. Diskusi dengan Kepala Bagian IPE Sekretariat Badan P2SDM

Hasil dari kegiatan ini antara lain : 1) terdapat 13 rencana topik berita lingkup Badan P2SDM yang rencananya akan dipublikasikan pada website Badan P2SDM atau media lain dan 2) seluruh Satker lingkup Badan P2SDM berkewajiban untuk menyusun Desain SPIP serta melakukan pemantauan/membuat laporan triwulan/tahunan dan menyampaikan kepada Kepala Badan P2SDM cq. Sekretaris Badan P2SDM dengan tembusan ke Sekretaris Inspektorat jenderal Kementerian LHK.

Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp167.931.355,00 atau 99,95% dari target anggaran sebesar

Rp168.016.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

e. Penyelenggaraan Pameran

Pelaksanaan Pameran dimaksudkan sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan penyuluhan kehutanan yang telah dilakukan. Disamping itu pameran juga sekaligus bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan kegiatan pembangunan kehutanan kepada masyarakat umum untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan pendapat, serta perilaku dan upaya-upaya pelestarian hutan dan upaya-upaya pembangunan hutan dan kehutanan.

Pada Tahun 2017, telah dilaksanakan 5 (lima) kali pameran yaitu:

1. Pameran dalam rangka Pameran "9th Indogreen Environment and Forestry Expo (IEFE) Tahun 2017 (JCC, 13 s/d 16 April 2017).
2. Pameran Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke XV Tahun 2017 (Aceh, 6 s/d 11 Mei 2017).
3. Pameran dalam rangka Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke 21 Tahun 2017 (JCC, 1 s/d 4 Juni 2017).
4. Pameran Festival Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2017 (Banyuwangi, 11 s/d 13 Agustus 2017).
5. Pameran Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) (Gd. Manggala Wanabakti-Jakarta, 6 s/d 8 September 2017).



Gambar 20. Kunjungan Anak Sekolah ke stand BP2SDM

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya 5 (lima) kegiatan pameran di Jakarta sebanyak 3 kali, Aceh, dan Banyuwangi – Jawa Timur. **Outcomenya** adalah terpromosikannya hasil-hasil kegiatan/usaha kelompok tani dan SMKK Negeri binaan Badan P2SDM.

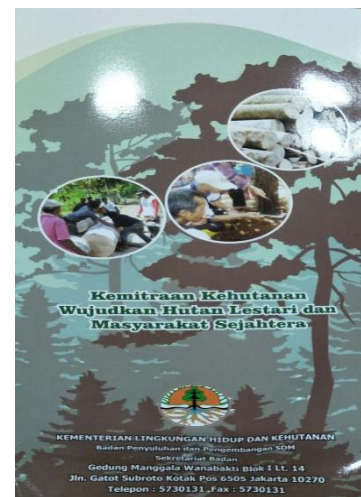
Capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp417.197.858,00 atau 99,41% dari target anggaran Rp419.671.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

f. Diseminasi Keberhasilan P2SDM

Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan materi penyuluhan berupa booklet dan leaflet kepada masyarakat. **Output** kegiatan ini adalah tersusunnya leaflet dan booklet tentang keberhasilan Penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung program nasional Kementerian LHK. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penyuluhan dan pengembangan SDM.

Adapun judul materi leaflet dan booklet yang telah disusun pada Tahun 2017 adalah:

1. Leaflet Kemitraan Kehutanan Wujudkan Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera.
2. Leaflet Pengembangan Wisata Alam pada Hutan Lindung oleh Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KT HKm).
3. Booklet Pengusahaan Bambu oleh Masyarakat.
4. Booklet Mengenal Perhutanan Sosial



Gambar 21. Cover Leaflet

Capaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp151.265.830,00 atau 99,62% dari target anggaran sebesar Rp151.847.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut,

capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

g. Publikasi di Media Cetak/Majalah

Publikasi di Media Cetak/Majalah bertujuan untuk mempublikasikan kegiatan Badan P2SDM yang akan dan telah dilaksanakan melalui media cetak kepada masyarakat umum. **Output** dari kegiatan ini adalah termuatnya kegiatan-kegiatan Badan P2SDM di media cetak. **Outcome** kegiatan ini adalah tersampainya kegiatan-kegiatan Badan P2SDM kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban penyampaian informasi publik yang dapat meningkatnya pengetahuan, dan perilaku dalam upaya pelestarian hutan serta pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Kegiatan-kegiatan Badan P2SDM yang telah dipublikasikan melalui Tabloid Agro Indonesia adalah sebagai berikut:

- Pemuatan Advetorial/Sosialisasi Kegiatan Publikasi di Media Cetak/Majalah Tabloid Agro Indonesia Edisi Nomor 633, tanggal 4 s/d 10 April 2017 pada halaman 12 dengan judul "Perusahaan HPH-HTI Wajib Punya Penyuluh",
- Pemuatan Advetorial/Sosialisasi Kegiatan Publikasi di Media Cetak/Majalah Tabloid Agro Indonesia Edisi Nomor 634, tanggal 11 s/d 17 April 2017 pada halaman 24 dengan judul "Mempertahankan Akreditasi A Pusdiklat Kehutanan",
- Pemuatan Advetorial/Sosialisasi Kegiatan Publikasi di Media Cetak/Majalah Tabloid Agro Indonesia Edisi Nomor 635, tanggal 18 s/d 24 April 2017 pada halaman 12 dengan judul "Agen Perubahan Berperan Tingkatkan Kinerja Aparatur KLHK Budaya Kerja Jangan Sebatas Jargon",
- Pemuatan Advetorial/Sosialisasi Kegiatan Publikasi di Media Cetak/Majalah Tabloid Agro Indonesia Edisi Nomor 636, tanggal 15 April s/d 1 Mei 2017 pada halaman 8 dengan judul "Kini Piala Adiwiyata Jadi Kebanggaan Sekolah",

- Pemuatan Advetorial/Sosialisasi Kegiatan Publikasi di Media Cetak/Majalah Tabloid Agro Indonesia Edisi Nomor 638, tanggal 9 s/d 15 Mei 2017 pada halaman 24 dengan judul "Kerjasama 'G to G' Dalam Mencetak Tenaga Terampil Kehutanan",
- Pemuatan Advetorial/Sosialisasi Kegiatan Publikasi di Media Cetak/Majalah Tabloid Agro Indonesia Edisi Nomor 639, tanggal 16 s/d 22 Mei 2017 pada halaman 8 dengan judul "Penyuluh Pendukung Perhutanan Sosial Mereformasi Kelompok Tani Hutan Melek Internet",
- Pemuatan Advetorial/Sosialisasi Kegiatan Publikasi di Media Cetak/Majalah Tabloid Agro Indonesia Edisi Nomor 641, tanggal 6 s/d 12 Juni 2017 pada halaman 8 dengan judul "Standar Kompetensi Jamin Kualitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan",
- Pemuatan Advetorial/Sosialisasi Kegiatan Publikasi di Media Cetak/Majalah Tabloid Agro Indonesia Edisi Nomor 642, tanggal 13 s/d 19 Juni 2017 pada halaman 8 dengan judul Pramuka Berperan dalam Perbaikan LHK Indonesia,
- Pemuatan Advetorial/Sosialisasi Kegiatan Publikasi di Media Cetak/Majalah Tabloid Agro Indonesia Edisi Nomor 643, tanggal 20 s/d 26 Juni 2017 pada halaman 8 dengan judul "Tinggi, Realisasi dan Serapan Anggaran BP2SDM",
- Pemuatan Advetorial/Sosialisasi Kegiatan Publikasi di Media Cetak/Majalah Tabloid Agro Indonesia Edisi Nomor 644, tanggal 4 s/d 10 Juli 2017 pada halaman 8 dengan judul Pusdiklat Kehutanan Siap Luncurkan e-learning "Keterbatasan Anggaran Munculkan Inovasi"
- Pemuatan artikel di Majalah Ekonomi Hijau pada edisi Bulan Oktober 2017 pada halaman 30 sd 37 dengan judul "Memerankan Penyuluh Kehutanan untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan".





Gambar 22. Pemuatan artikel di Majalah Ekonomi Hijau

Capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp147.789.500,00 atau 99,76% dari target anggaran Rp148.149.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

h. Penyelenggaraan Pertemuan Forum Komunikasi Penyuluh, Widyaiswara, Peneliti dan Guru SMK Kehutanan

Kegiatan Forum Komunikasi Penyuluh, Widyaiswara, Peneliti dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan dimaksudkan untuk meningkatkan komunikasi antara Badan Litbang dan Inovasi dengan Badan P2SDM dalam mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian menjadi materi penyuluhan bagi para penyuluh dan bahan ajar bagi widyaiswara dan guru dalam menunjang kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 26 – 27 April 2017 di Pusat Diklat SDM LHK Bogor.

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pertemuan Forum Komunikasi Penyuluh, Widyaiswara, Peneliti dan Guru Sekolah Menengah



Kejuruan Kehutanan sebagai media tukar menukar informasi dan pengetahuan. **Outcome** kegiatan ini adalah terumuskannya rancangan bahan ajar dan materi penyuluhan dari hasil penelitian.

Gambar 23. Narasumber Dr. Titik Setiawati memberikan materi IAS (Invansive Alien Species) dalam pertemuan Forum Komunikasi Penyuluh, Widyaiswara, Peneliti dan Guru SMK Tahun 2017.

Capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp117.361.000,00 atau 99,97% dari target anggaran Rp117.401.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

i. Penyusunan Laporan Capaian Renja 2016 dan Laporan Tahunan 2016

Output dari Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Renja 2016 dan Laporan Tahunan 2016 adalah tersusunnya Laporan Capaian Renja 2016 Dan Laporan Tahunan 2016 lingkup Badan P2SDM dan Sekretariat Badan P2SDM. Penyusunan laporan tersebut sebagai pertanggungjawaban secara administratif dan fisik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan P2SDM dan Badan P2SDM. **Outcome** dari penyusunan laporan capaian renja dan laporan tahunan ini adalah memberikan informasi tentang kinerja dan umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pemantapan perencanaan pada waktu yang akan datang.



Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp119.295.600,00 atau 99,81% dari target sebesar Rp119.520.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

Gambar 24. Laporan Capaian Renja Badan P2SDM Tahun 2016

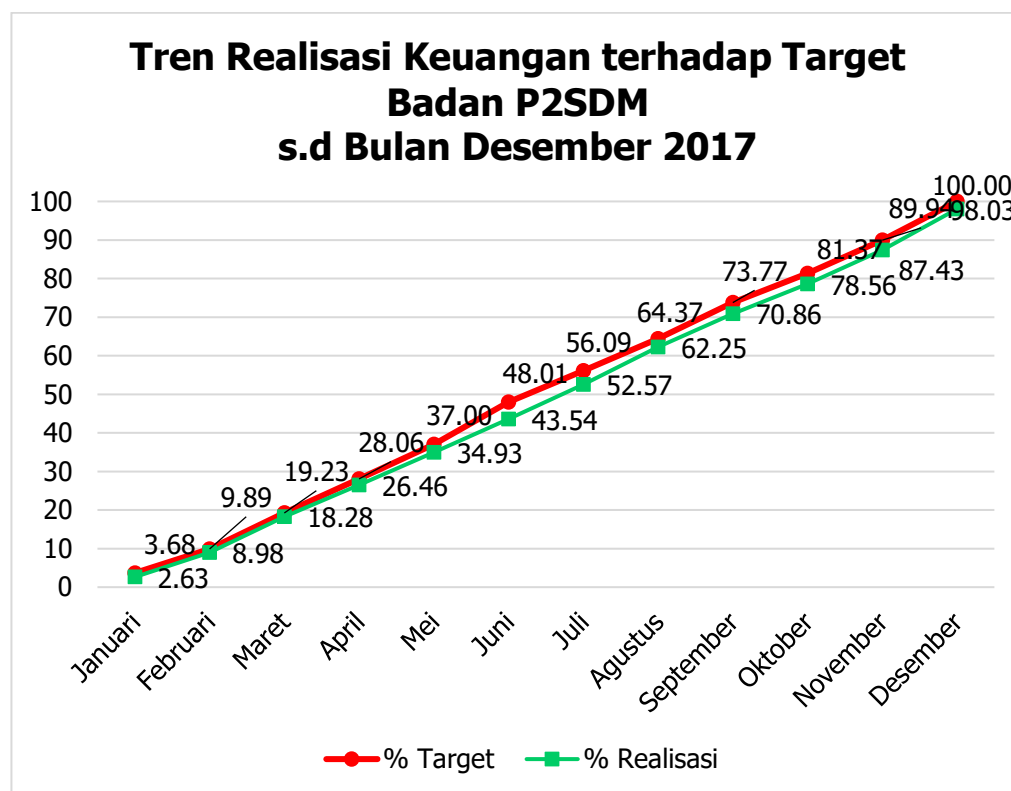
j. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan P2SDM

Monitoring dan evaluasi dilakukan pada kegiatan penyerapan DIPA lingkup Badan P2SDM dan IKP Badan P2SDM. **Ouput** dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan P2SDM. **Outcome** dari laporan monitoring dan evaluasi ini adalah kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM menjadi lebih terarah karena mendapat *feedback* dari hasil monitoring dan evaluasi.



Gambar 25. Rapat Pimpinan lingkup Badan P2SDM

Hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran Badan P2SDM Tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Capaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp253.038.096,00 atau 99,92% dari target anggaran sebesar Rp253.232.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

k. Penyusunan Pedoman Penilaian Kriteria dan Indikator Badan P2SDM

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya Pedoman Penilaian Kriteria Dan Indikator Badan P2SDM yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.6/P2SDM/SET/REN.2/5/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan P2SDM tanggal 29 Mei 2017. **Outcome** dari penyusunan pedoman ini adalah meningkatnya kinerja Satker lingkup Badan P2SDM secara optimal dengan tersedianya acuan bagi pengelola Satker untuk memonitor dan mengevaluasi kinerjanya.



Capaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp55.607.000,00 atau 99,90% dari target anggaran sebesar Rp55.660.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

Gambar 26. Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan P2SDM

l. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan

Penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dilakukan setiap bulan dan triwulan yang berupa laporan Bulanan dan Triwulan Sekretariat Badan P2SDM serta Laporan Bulanan dan Triwulan Badan P2SDM. Laporan ini secara rutin disusun dan dilaporkan kepada

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Sekretaris Jenderal pada tanggal 10 setiap bulannya.

Output dari kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan ini adalah tersusunnya laporan Sekretariat Badan P2SDM dan laporan Badan P2SDM secara periodik yaitu setiap bulan dan triwulan serta terpenuhinya batas waktu pengumpulan laporan Badan P2SDM kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap bulannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Outcome dari kegiatan ini adalah terpantaunya pelaksanaan



kegiatan Sekretariat Badan P2SDM dan Badan P2SDM, penyerapan anggaran, dan kendala serta tindak lanjutnya yang diharapkan menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan di bulan/triwulan selanjutnya.

Gambar 27. Penginputan data bulanan di aplikasi e-Monev Anggaran

Kegiatan ini telah terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp303.666.950,00 atau 99,96% dari target anggaran sebesar Rp303.779.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

m. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada tahun 2017 telah dilakukan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Satker Sekretariat Badan P2SDM dan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah lingkup Badan P2SDM Tahun 2016.

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Sekretariat Badan P2SDM dan Badan P2SDM.

Outcome dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah

meningkatnya pelaksanaan *good governance* lingkup Badan P2SDM. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan P2SDM dan Badan P2SDM Tahun 2016 sebagai bagian dari SAKIP telah diaudit dan dinilai oleh Inspektorat Jenderal Kemenhut. Adapun hasil evaluasi SAKIP Badan P2SDM Tahun 2016 termasuk dalam kategori BB (Sangat Baik) dengan nilai 72,09.



Gambar 28. Cover LKj Badan P2SDM

Kedua laporan ini telah dilaksanakan pada bulan Januari s/d Februari 2017 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp128.236.500,00 atau 99,99% dari target Rp128.250.000. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

o. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini meliputi penyusunan Design SPIP Sekretariat Badan P2SDM serta monitoring pelaksanaan SPIP setiap triwulan dan tahunan.



Gambar 29. Desain SPIP Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya Desain Penyelenggaraan SPIP Sekretariat Badan P2SDM, laporan pemantauan desain per triwulan dan laporan pemantauan tahunan, serta Laporan Evaluasi SPIP Sekretariat Badan P2SDM. **Outcome** dari penyusunan desain dan laporan SPIP adalah meningkatnya akuntabilitas serta maturitas SPIP Sekretariat Badan P2SDM.

Kegiatan ini telah terlaksana 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp89.502.000,00 atau 99,96% dari target anggaran sebesar Rp89.535.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

4) Tata kelola di Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata laksana

Elemen kegiatan ini terdiri atas 11 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Realisasi anggaran untuk elemen kegiatan Tata Kelola di Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana adalah sebesar Rp2.608.836.317,00 dari target anggaran sebesar Rp2.611.600.000,00. Adapun realisasi kegiatan elemen ini adalah 11 laporan dari target 11 laporan. Secara rinci capaian elemen kegiatan Tata Kelola di Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pembinaan Pegawai

Pembinaan kepegawaian dimaksudkan agar setiap pegawai mengingat tanggung jawab dari tupoksi yang diembannya serta secara berkesinambungan dapat membina etos kerja dan profesionalisme pegawai lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.



Gambar 30. Pembinaan pegawai Sekretariat Badan P2SDM di Cikole Jayagiri

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pembinaan pegawai Sekretariat Badan P2SDM dan Badan P2SDM.

Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman pegawai Sekretariat Badan P2SDM dan Badan P2SDM mengenai tanggung jawab dan tupoksi yang diembannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terciptanya keseimbangan antara pekerjaan dengan kebutuhan rohani.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan Sekretariat Badan P2SDM antara lain:

- 1) Pembinaan Pegawai tanggal 31 Maret s/d 1 April 2017 di Cikole Jayagiri.
- 2) Pembinaan pegawai lingkup Satker Pusat dan BDLHK Bogor dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 di aula Pusat Diklat SDM LHK.
- 3) Pembinaan pegawai lingkup Satker Pusat dan BDLHK Bogor dalam rangka halal bihalal 1 Syawai 1438 Hijriah dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2017 di aula Pusat Diklat SDM LHK.
- 4) Sosialisasi PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS kepada pejabat struktural dan fungsional lingkup BP2SDM pada tanggal 28 Agustus 2017.
- 5) Pembinaan dan Penanaman Pohon lingkup BP2SDM tanggal 27 Oktober 2017 di areal KHDTK dan aula BDLHK Bogor.

Kegiatan Pembinaan Pegawai terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp459.079.454 dari target anggaran sebesar Rp460.100.000,00 atau 99,78%. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

b. Pembinaan Kesegaran Jasmani



Gambar 31. Tim Futsal Sekretariat BP2SDM

Pembinaan kesegaran jasmani dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai dapat membangun kerjasama dan berkoordinasi sesama pegawai Badan P2SDM.

Adapun tujuan pembinaan kesegaran jasmani tersebut untuk membangun kerjasama dan meningkatkan lingkungan kerja yang sehat

dengan didukung oleh pegawai yang sehat, bertanggungjawab, berakhlak mulia, jujur dan disiplin dalam menjalankan tugasnya.

Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya pegawai Badan P2SDM yang sehat jasmani. **Outcome** dari kegiatan ini adalah meningkatnya interaksi, kekompakan dan nilai korsa pegawai Kementerian LHK.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan kesegaran jasmani lingkup Badan P2SDM antara lain:

1. Kegiatan pembinaan kesegaran jasmani dapat memfasilitasi kegiatan rutin setiap bulannya misalnya :
 - Penyediaan sewa lapangan futsal yang latihannya di luar Kementerian LHK termasuk penyediaan bola futsal.
 - Penyediaan peralatan pergantian senar raket, raket, kok/bola bulu tangkis.
 - Penyediaan peralatan tenis meja seperti tas, bola dan bet.
 - Penyediaan konsumsi saat latihan maupun even-even kegiatan kesegaran jasmani.
 - Penyediaan personal use/seragam dari setiap cabang olah raga, misalnya Badminton, Futsal, tenis meja, basket dan lain-lain.
2. Pembinaan kesegaran jasmani pada Hari Bakti Rimbawan
3. Pembinaan kesegaran jasmani pada hari Korpri

Kegiatan Pembinaan Kesegaran Jasmani terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp67.368.500,00 dari target anggaran sebesar Rp67.500.000,00 atau 99,81%. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

- c. Pemutakhiran data pegawai dan Penyusunan Laporan Lingkup Badan P2SDM

Maksud diselenggarakannya pemutakhiran data pegawai lingkup Badan P2SDM adalah untuk mendapatkan database pegawai lingkup Badan P2SDM yang tepat dan akurat. Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

- Untuk menyeragamkan data yang dikelola dimasing-masing unit kerja lingkup Badan P2SDM.
- Memberikan pendampingan cara agar dapat melakukan pemeliharaan data-data kepegawaian dengan benar.
- Untuk meningkatkan akurasi, relevan dan aktualisasi data serta informasi kepegawaian dalam rangka pembinaan, pengelolaan dan pelayanan bidang kepegawaian secara efisien dan efektif dan tidak merugikan hak-hak seorang PNS.

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya data pegawai yang lengkap, benar dan terkini sesuai dengan ketentuan kenaikan pangkat dan pensiun online. **Outcome** dari kegiatan ini adalah mempermudah pengelolaan administrasi kepegawaian.

Kondisi dan permasalahan dalam pemutakhiran data pegawai lingkup Badan P2SDM pada Tahun 2017 adalah:

- 1) Kondisi Pengelolaan Data SIMPEG
 - Terdapat beberapa Satker yang belum ter-update data simpegnya dengan baik.
- 2) Permasalahan Pengelolaan Data SIMPEG
 - Kurangnya kepedulian Kepala Satker terhadap pengelolaan simpeg pada unit kerjanya.
 - Peran serta dan kepedulian PNS dalam pemeliharaan data simpeg belum positif dengan memberikan dokumen kepegawaian untuk perbaikan data yang diperlukan oleh pengelola kepegawaian, dan memberikan kesempatan untuk mengoreksi data.
 - Pemeliharaan data berupa pemutakhiran data (sebagian besar) belum dilakukan secara rutin dan terus menerus sesuai perkembangan dan berdasarkan dokumen yang ada secara konsisten, sehingga belum dapat disajikan secara aktual dan akurat.
 - Setiap perubahan dokumen baru seperti kenaikan pangkat, sanksi, jabatan, gaji, dan pelatihan belum ditransaksikan untuk validasi data.

- Data yang sangat urgen adalah masih terdapat perbedaan data NIP Konversi dari BKN dengan tanggal, bulan dan tahun lahir pegawai tidak sama, namun tidak diusulkan ralatnya.

Kegiatan Pemutakhiran Data Pegawai terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp228.142.543,00 dari target anggaran sebesar Rp228.196.000,00 atau 99,98%. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

d. Pengambilan Sumpah PNS, Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut lingkup Badan P2SDM

Pelaksanaan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan, serah terima jabatan dan pisah sambut ini dimaksudkan untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian dan dapat terpenuhi keabsahan sebagai pejabat maupun pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan tujuannya untuk mendorong bagi pejabat dan pegawai baru agar segera menempati posisi yang baru dan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Output kegiatan ini adalah terselenggaranya pengambilan sumpah PNS, serah terima jabatan dan pisah sambut lingkup Badan P2SDM.

Outcome dari kegiatan ini adalah terpenuhinya keabsahan sebagian pejabat maupun PNS dalam melaksanakan tugasnya.



Gambar 32. Serah Terima Jabatan Struktural Eselon III lingkup Badan P2SDM

Pelaksanaan kegiatan pelantikan, serah terima jabatan dan sumpah/janji PNS pada UPT dan Pusat lingkup Badan P2SDM dengan kegiatan:

- Pelepasan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Bpk. Dr. Ir. Bambang Supijanto, MM., yang telah memasuki masa pensiun tertanggal 1 Januari 2017.
- Serah terima jabatan struktural eselon III lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, tanggal 28 September 2017.
- Pelaksanaan sumpah PNS lingkup pegawai BDLHK Samarinda dan SMKKN Samarida tanggal 10 Maret 2017.
- Pelantikan pejabat fungsional WI tanggal 21 Juli 2017.

Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp134.745.500,00 dari target sebesar Rp134.904.000,00 atau 99,88%. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

e. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional lingkup Badan P2SDM

Maksud pelaksanaan kegiatan penilaian angka kredit pejabat fungsional lingkup Badan P2SDM adalah agar administrasi jabatan fungsional berjalan lancar sebagai sarana peningkatan karier yang bersangkutan. Adapun tujuannya adalah penilaian kinerja para pejabat fungsional yang harus dipenuhi sebagai syarat kenaikan pangkat dan karier yang bersangkutan.

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya penilaian angka kredit pejabat fungsional lingkup Badan P2SDM. **Outcome** kegiatan ini adalah adanya kepastian karier pejabat fungsional dan tertibnya administrasi jabatan fungsional lingkup Badan P2SDM.

Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar



Rp318.502.300,00 atau 99,92% dari target sebesar Rp318.760.000,00.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

Gambar 33. Proses Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

f. Koordinasi Pengelola Administrasi Jabatan Fungsional

Kegiatan ini meliputi: orasi ilmiah, revisi Permenpan No 27 Tahun 2013, penyusunan pedoman karya tulis ilmiah. **Output** dari kegiatan ini adalah terwujudnya administrasi jabatan fungsional lingkup Badan P2SDM yang tertib dan sesuai dengan aturan. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan wawasan para pejabat fungsional dalam pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp147.368.750,00 atau 99,61% dari target sebesar Rp147.950.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**

g. Penilaian Kinerja Guru

Penilaian Kinerja Guru (PKG) adalah serangkaian proses sistematis kegiatan menghimpun, mengolah dan menafsirkan data mengenai kemampuan guru untuk menampilkan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran secara profesional. PKG merupakan penilaian prestasi kerja profesi guru (*Performance Appraisal*) yang difokuskan pada kinerja individu, mengidentifikasi kemampuan guru dalam mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.



Gambar 34. Penilaian Kinerja Guru di SMKK Pekan Baru

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya penilaian kinerja guru dalam peningkatan karier yang bersangkutan. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya karier pejabat fungsional guru dan tertibnya administrasi jabatan fungsional guru lingkup Badan P2SDM.

Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp154.364.295,00 atau 99,99% dari target sebesar Rp154.372.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk kategori **efisien**.

h. Pembinaan Pejabat Fungsional Lingkup BP2SDM

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pembinaan pejabat fungsional lingkup Badan P2SDM. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman pejabat fungsional terhadap peraturan dan tata cara penyusunan dupak sesuai dengan pedoman.

Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp194.602.366,00 atau 99,98% dari target sebesar Rp194.650.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk kategori **efisien**.

i. Pengembangan Pegawai lingkup Badan P2SDM

Kegiatan Pengembangan Pegawai lingkup Badan P2SDM Tahun 2017 mengikutsertakan pejabat fungsional Satker Sekretariat Badan P2SDM dalam diklat pembentukan jabatan fungsional perancang peraturan

perundang-undangan. **Output** dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pengembangan pegawai lingkup Badan P2SDM. **Outcome** kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin pegawai.

Kegiatan Pengembangan Pegawai ini terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp49.837.300,00 atau 99,48% dari target sebesar Rp50.100.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

j. Penyusunan Draft Peraturan Bidang P2SDM

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya peraturan bidang P2SDM beserta UPTnya. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah untuk ternaunginya seluruh kegiatan bidang P2SDM beserta UPTnya dengan dasar hukum yang kuat.

Kegiatan penyusunan draft peraturan bidang P2SDM memiliki target 10 draft peraturan Menteri LHK dengan realisasi 13 draft. Capaian draft



peraturan Menteri LHK yang dimaksud merupakan draft peraturan Menteri LHK yang sudah selesai di Biro Hukum. Adapun realisasi peraturan yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

Gambar 35. Pembahasan draft peraturan perundangan dengan pihak-pihak terkait

Tabel 21. Hasil kegiatan Penyusunan Konsep Peraturan Bidang P2SDM

No	Judul	Penyelesaian
1.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Tugas Belajar PNS lingkup KLHK	<i>P.29/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017</i>
2.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pendidikan Dengan Biaya Mandiri Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<i>P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017</i>
3.	Permenlhk tentang Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil	<i>P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017</i>
4.	Permenlhk tentang Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<i>P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2017</i>
5.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Administrator Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<i>P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017</i>
6.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pengawas Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<i>P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017</i>
7.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2014 tentang Bakti Rimbawan Dalam Pembangunan Kehutanan	<i>P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017</i>
8.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan	<i>P.13/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017</i>
9.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Teknis PNS Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup di Daerah	<i>P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017</i>
10.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan	<i>P.47/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2017</i>
11.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standard dan Uji Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	<i>P.56/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2017</i>
12.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	<i>P.55/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2017</i>
13.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<i>P.62/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017</i>

No	Judul	Penyelesaian
	Nomor P.37/Menlhk/Setjen /Kum.1/4/2016 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan	

Disamping peraturan Menteri LHK, juga dihasilkan peraturan pelaksanaan lainnya yaitu 12 Peraturan Kepala Badan P2SDM, 6 SK Keputusan Menteri LHK, dan 5 buah SK Keputusan Kepala Badan. Selain itu diselenggarakan rapat-rapat tentang masukan terhadap revisi permenlhk no 18 dan permenlhk tentang bisnis proses lingkup kemenlhk yang melibatkan eselon II lingkup BP2SDM.

Kegiatan ini terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp664.442.509,00 atau 99,97% dari target sebesar Rp664.668.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

k. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Lingkup Badan P2SDM

Kegiatan ini terdiri dari sosialisasi, penilaian mandiri serta monitoring dan pelaporan. Pada Tahun 2017 Badan P2SDM sudah mempersiapkan Satker yang akan dinilai yaitu Pusat Diklat SDM LHK dan BDLHK Kadipaten. Kedua Satker tersebut diharapkan siap untuk dinilai kembali pada Tahun 2018.

Output dari kegiatan ini adalah hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi serta pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara lingkup Badan P2SDM. **Outcome** dari kegiatan ini adalah terciptanya pegawai lingkup Badan P2SDM yang tertib dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Kegiatan ini terealisasi sebesar 100% dengan realisasi capaian keuangan sebesar Rp190.382.800,00 atau 99,99% dari target sebesar Rp190.400.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

5.2 Layanan Internal

Kegiatan ini terdiri dari 2 paket yaitu renovasi ruang rapat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt 7 serta renovasi ruang arsip Sekretariat Badan P2SDM di Pusat Diklat SDM LHK Bogor. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya ruang rapat Badan P2SDM ruang arsip Sekretariat Badan P2SDM. Outcome kegiatan ini adalah terciptanya ruang kerja yang nyaman untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Badan P2SDM.

Kegiatan ini terealisasi sebesar 100% dengan realisasi capaian keuangan sebesar Rp47.500.000,00 atau 98,96% dari target sebesar Rp48.000.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

5.3 Layanan Perkantoran

Kegiatan layanan perkantoran merupakan kegiatan rutinitas untuk kelancaran suatu organisasi yang berisi pengelolaan gaji dan operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 12 bulan. *Outcome* dari kegiatan layanan perkantoran adalah terlaksananya kegiatan perkantoran yang efektif dan efisien. Sedangkan dampaknya adalah meningkatnya kinerja pegawai.

Pelaksanaan kegiatan ini terealisasi sebesar Rp20.461.251.395,00 atau 99,55% dari target anggaran Rp20.552.732.000,00. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian fisik kegiatan lebih besar dari realisasi anggaran maka elemen kegiatan ini termasuk dalam kategori **efisien**.

B. Realisasi Anggaran

1. Pelaksanaan Capaian Anggaran Berdasarkan Dokumen Perencanaan Kinerja

Total Anggaran (Pagu) pada Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 adalah sebesar Rp28.433.742.000,00 dengan realisasi sebesar Rp28.362.710.923,00 atau sebesar 99,75% dan capaian fisik sebesar 100%. Pelaksanaan Capaian Anggaran Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 22 berikut.

Tabel 22. Pelaksanaan Capaian Anggaran Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017

Sasaran	Indikator	Output Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Anggaran
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan P2SDM	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A) di Tahun 2019	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : "SAKIP" minimal 82 Poin	9.761.956.000	9.109.461.536	99,75
		Layanan Internal	48.000.000	47.500.000	98,96
		Layanan Perkantoran	18.623.786.000	18.578.082.275	99,75
Total			28.433.742.000	28.362.710.923	99,75

2. Permasalahan dan Saran Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan dalam proses penyerapan Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 antara lain:

- Adanya peraturan baru tentang Mekanisme proses TUP yang belum diketahui oleh pelaksana kegiatan dan PUP sehingga Proses Nihil TUP mengalami keterlambatan

- Adanya mekanisme penilaian baru dalam penilaian SAKIP yang belum disosialisasikan oleh Itjen sehingga nilai SAKIP Badan P2SDM turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
- Terdapat permen yang dikembalikan ke BP2SDM karena terjadi perubahan substansi materi yaitu permen tentang pedoman umum pelaksanaan adiwiyata dan permen tentang penyelenggaraan Latmas dan pengembangan generasi lingkungan.
- Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Sekretariat Badan P2SDM, agar permasalahan tersebut tidak terulang di Tahun 2018, antara lain:

- Dalam rangka optimalisasi kegiatan, Satker Sekretariat Badan P2SDM agar lebih mengutamakan penarikan anggaran dengan mekanisme LS dan UP dari pada mekanisme TUP yang dibatasi dan ditentukan mekanisme pencairannya.
- Itjen perlu melakukan sosialisasi kembali mengenai sistem baru mengenai penilaian SAKIP.
- Melakukan pencermatan mengenai penjadwalan pelaksanaan kegiatan dengan POK yang telah dibuat.

BAB IV PENUTUP

Sekretariat Badan P2SDM menetapkan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM yang tertuang di dalam Indikator Kegiatan yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Lingkungan Badan P2SDM Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00." Pada tahun 2017, target nilai SAKIP yang ditetapkan adalah 82,00.

Capaian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM diperoleh dari hasil penilaian SAKIP Badan P2SDM yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK sebesar 72,09. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 sebesar 87,91%, maka rasio efektivitas capaian kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 sebesar 0,97. Hasil ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan P2SDM (efektivitas < 1). Penurunan tersebut disebabkan adanya perubahan mekanisme penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya dan belum disosialisasikan ke semua eselon I lingkup Kementerian LHK.

Meskipun demikian, jika dilihat dari realisasi penyerapan anggaran Satker Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017 sebesar Rp28.362.710.923,00 atau sebesar 99,75% dengan capaian fisik sebesar 100%. Rasio efisiensi capaian kinerja Sekretariat Badan P2SDM sebesar 1,00 (≥ 1). Hal menunjukkan bahwa Sekretariat Badan P2SDM telah efisien dalam menggunakan anggaran yang telah dialokasikan sesuai target yang diperjanjikan.

Laporan kinerja ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Badan P2SDM, yang diharapkan akan dapat lebih meningkatkan kinerja capaian sasaran sesuai dengan arahan dan kebijakan yang ditetapkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Amrih Wikan Hartati

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Bambang Soepijanto, MM

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Bambang Soepijanto, MM
NIP. 19561215 198203 1 002

Jakarta, Desember 2016

Pihak Pertama,

Ir. Amrih Wikan Hartati
NIP. 19571206 198303 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja 2015-2019	Target Kinerja 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan P2SDM	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A) di Tahun 2019	82 Poin

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Badan P2SDM

Anggaran

Rp. 29.757.568.000,-

Pihak Kedua,


Dr. Ir. Bambang Soepijanto, MM
NIP. 19561215 198203 1 002

Jakarta, Desember 2016

Pihak Pertama,


Ir. Amrih Wikan Hartati
NIP. 19571206 198303 2 002

Lampiran 2. Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Amrih Wikan Hartati

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Helmi Basalamah, M.M.

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Helmi Basalamah, M.M.
NIP. 19611119 198802 1 001

Jakarta, Agustus 2017

Pihak Pertama,

Ir. Amrih Wikan Hartati
NIP. 19571206 198303 2 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja 2015-2019	Target Kinerja 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan P2SDM	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A) di Tahun 2019	82 Poin

Kegiatan

**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Badan P2SDM**

Anggaran

Rp. 28.433.742.000,-

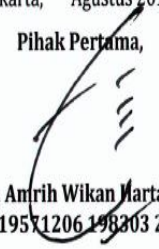
Pihak Kedua,



Ir. Helmi Basalamah, M.M.
NIP. 19611119 198802 1 001

Jakarta, Agustus 2017

Pihak Pertama,


Ir. Anrih Wikan Martati
NIP. 19571206 198303 2 002

Lampiran 3. Daftar Kerjasama Dalam Negeri lingkup Badan P2SDM

No	Penandatanganan Kerja Sama		Judul Kerja Sama	Nomor Dokumen Kerja Sama	Bidang Kerja Sama	Jangka Waktu
	Pihak Pertama	Pihak Kedua				
1	SMKK Kadipaten	ASMINDO	Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda Dalam Bentuk Praktek Kerja Industri Pola Magang	S.84/SMKHUT-I/2012	Pendidikan	2012-2017
2	Badan P2SDM	Arara Abadi dan Yayasan Dharma Eka Tjipta	Praktek Kerja Magang, Beasiswa, Kesempatan Bekerja dan Peningkatan Kualitas SDM	PKS.01/XI-SET/2012 01/SDM/AA-ETF-BP2SDMK/LA/VI/2012 01/ETF/MOU/06/2012	Pendidikan	2012-2017
3	Badan P2SDM	Perum Perhutani	Peningkatan Kualitas SDM Kehutanan di Bidang Pendidikan Menengah, Pendidikan dan Pelatihan serta Penyuluhan Kehutanan	3/IX-SET/2012 dan 069/SJ/DIR/2012	Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan	2012-2017
4	Kepala Badan P2SDM	KABADAN DIKLAT KEMENDAGRI (MoU)	Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintahan Daerah di Bidang Kehutanan	Pks.1/IX-Set/2014 dan 119-784 Tahun 2014	Peningkatan Kapasitas	2014-2019
5	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Mendikbud, Meristek, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri	Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016 Dan 99/VII/NK/2016, 11a/M/NK/2016, No.9 Tahun 2016 dan 660/2688A/SJ	Wawasan Lingkungan Hidup	2016-2021
6	Rektor Institut Pertanian Stiper	Kepala Badan P2SDM KLHK	Pengembangan Sumber Daya Manusia	0170.E1.KS.2015 dan NK.02/P2SDM-Setbadan/2015	SDM	2015-2020
7	Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Stiper	Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM KLHK	Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	No.064.FK.S.2015 dan PKS.7/renbang-2/2015	Bidang LHK	2015-2020
8	Kepala Pusrenbang SDM KLHK	Direktur Sekolah Vokasi UGM	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekolah Vokasi	No.PKS.6/RENBANG-2/ 2015 DAN No.24/Dir/KS/SV/2015	Peningkatan SDM Bid LHK di Vokasi	2015-2020
9	Kepala BP2SDM KLHK	Direktur Sekolah Vokasi UGM	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekolah Vokasi	NK.01/P2SDM-Setbadan/2015 dan No.22/Dir/KS/SV/2015	Peningkatan SDM Bid LHK di Vokasi	2015-2020
10	Kepala BP2SDM KLHK	Dekan Fakultas Hukum UGM	Penyelenggaraan Pendidikan Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Litigasi	No.PKS.2/P2SDM/SET/KUM.3/9/2016 dan No. 3919/H.01.H4.FH/I/ 2016	Pasca Sarjana Studi Magister Hukum Litigasi	2016-2019
11	Menteri Kehutanan	MENDIKBUD	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan	NK.2/Menhut-IX/2013	Pendidikan	2013-2018

				001/VI/KB/2013		
12	Kabupaten Pengembangan SDM	Dirjen PMK DIKBUD dan Kabupaten Pengembangan SDM Pendidikan Kemendikbud	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	PKS.4/IX-SET/2013 881/D.D3/KP/2013 193337/1/SP/2013	Pendidikan	2013-2018
13	Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan (Kemenhub)	Kepala Pusdiklat SDM LHK	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Kemenhub	HK.201/1/6/PPSDMAP-2016 dan PKS.2/DIK/PEPE/KUM.3/6/2016	Pendidikan Pelatihan	2016-2019
14	Kepala Badan P2SDM	Bupati Kapuas Hulu	Kerjasama Pendidikan Bagi Putra Daerah Yang Berasal Dari Masyarakat Adat Di Sekitar Kawasan Hutan Kabupaten Kapuas Hulu Di SMKKN Samarinda	PKS.1/P2SDM/SET/DIK.4/5/2016 dan 420/II/MOU/SETDA/HK-B/2016	Pendidikan	2016-2019

Lampiran 4. Surat Sekretaris Badan P2SDM kepada Biro Perencanaan tentang
Penyelarasan IKU Badan P2SDM



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
SEKRETARIAT BADAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 14 Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270
Telp. (021) 5730131 Fax. 5730131, e-mail: setbp2sdmk@dephut.go.id

21 November 2017

Nomor : S.1734/SET/IFE/RBN.2/11/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Indikator Kinerja Utama (IKU) BP2SDM

Yth.
Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KLHK
di
Jakarta

Menindaklanjuti hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian LHK pada evaluasi SAKIP Badan P2SDM Tahun 2016, bahwa Badan P2SDM perlu melakukan penyelarasan antara Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sehubungan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan dokumen IKU Badan P2SDM sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan

In A. Wikari Hartati
NIP. 19571206 198303 2 002